

**DILEMA KEAMANAN NEGARA-NEGARA ANGGOTA QUADRILATERAL  
SECURITY DIALOGUE (QSD) TERKAIT MODERNISASI DAN  
REFORMASI MILITER TIONGKOK, 2017—2020**

**(Skripsi)**

**Oleh**

*Farid Andriansyah Pandu Putra*  
**NPM 1716071060**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2022**

## ABSTRAK

### DILEMA KEAMANAN NEGARA-NEGARA ANGGOTA QUADRILATERAL SECURITY DIALOGUE (QSD) TERKAIT MODERNISASI DAN REFORMASI MILITER TIONGKOK, 2017—2020

Oleh

Farid Andriansyah Pandu Putra

QSD yang beranggotakan Amerika Serikat, Jepang, Australia, dan India memiliki persepsi negatif terkait kebijakan modernisasi dan reformasi militer Tiongkok karena hal tersebut dapat mengganggu kepentingan negara-negara di kawasan Indo-Pasifik. Persepsi negatif mereka terkait kebijakan Tiongkok, kemudian mendorong keempat negara membentuk kemitraan strategis QSD sebagai bentuk penyeimbangan; hal ini dinilai sebagai kondisi dilema keamanan pada negara. Penelitian ini mendeskripsikan modernisasi dan reformasi militer Tiongkok dan menganalisis dilema keamanan dari negara anggota QSD terkait modernisasi dan reformasi militer Tiongkok periode 2017—2020 dengan menggunakan pendekatan metode penelitian kualitatif dan tipe penelitian deskriptif; menggunakan konsep *security dilemma*, konsep *strategic partnership*, konsep *military modernisation*, dan konsep *military reform*; serta memakai sumber data sekunder yang diperoleh dari publikasi-publikasi pemerintah negara-negara terkait, dan kajian-kajian penelitian para peneliti dan lembaga *think tank* layaknya Stockholm International Peace Research Institute, International Institute for Strategic Studies, dan National Institute for Defense Studies. Hasil dari penelitian ini adalah modernisasi dan reformasi militer Tiongkok menempatkan Amerika Serikat, Australia, India, dan Jepang berada dalam kondisi dilema keamanan, yakni ketika negara mempersepsikan hal tersebut negatif, sehingga dari adanya kondisi

tersebut mendorong keempat negara anggota QSD melakukan tindakan perimbangan oleh masing-masing negara terkait dan tindakan perimbangan dalam kemitraan strategis QSD oleh keempat negara tersebut.

**Kata Kunci:** *Security Dilemma, Quadrilateral Security Dialogue, Military Modernisation, Military Reform, Tiongkok.*

## **ABSTRACT**

### **THE SECURITY DILEMMA OF MEMBERS OF THE QUADRILATERAL SECURITY DIALOGUE (QSD) REGARDING CHINA'S MILITARY MODERNISATION AND REFORM, 2017—2020**

**By**

**Farid Andriansyah Pandu Putra**

The QSD consisting of the United States, Japan, Australia, and India has a negative perception of Chinese modernisation and military reform policies, because it can interfere with the interests of countries in the Indo-Pacific region. Their negative perception of China's policies then pushed the four countries to form a strategic partnership of QSD as a form of balancing; this is considered as security dilemma condition. This study describes the modernisation and reform of the Chinese military and analyses the security dilemmas of QSD member countries related to the modernisation and reform of China's military for the 2017—2020 period by using a qualitative research method approach and descriptive research type; using the concept of security dilemma, the concept of strategic partnership, the concept of military modernisation, and the concept of military reform; with using secondary data sources obtained from government publications of related countries, and research studies by researchers and think tanks such as the Stockholm International Peace Research Institute, the International Institute for Strategic Studies, and the National Institute for Defense Studies. The result of this study is that the modernisation and reform of China's military places the United States, Australia, India, and Japan in security dilemma condition, namely when the state perceives that as negatively. These conditions prompted the four QSD member countries to

take balancing actions by each related country and balancing actions in the QSD strategic partnership by the four countries.

**Keywords: Security Dilemma, Quadrilateral Security Dialogue, Military Modernisation, Military Reform, China.**

Judul Skripsi

: DILEMA KEAMANAN NEGARA-NEGARA

ANGGOTA QUADRILATERAL SECURITY

DIALOGUE (QSD) TERKAIT MODERNISASI

DAN REFORMASI MILITER TIONGKOK,

2017—2020

Nama Mahasiswa

: Farid Andriansyah Pandu Putra

Nomor Pokok Mahasiswa

: 1716071060

Program Studi

: Hubungan Internasional (S1)

Fakultas

: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP)



1. Komisi Pembimbing

A blue ink signature of Iwan Sulistyono, written in a cursive style.

Iwan Sulistyono, S.Sos., M.A.  
NIP. 196004161986032002

A black ink signature of Roby Rakhmadi, written in a cursive style.

Roby Rakhmadi, S.Sos., M.Si.  
NIP. 199006062019031019

2. Ketua Jurusan Hubungan Internasional

A blue ink signature of Dr. Ari Darmastuti, written in a cursive style.

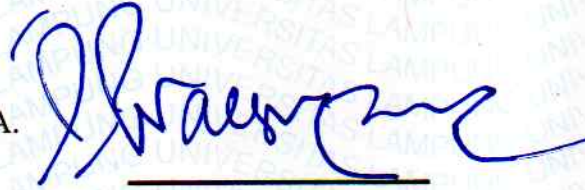
Dr. Ari Darmastuti, M.A.  
NIP. 196004161986032002



**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**

**Ketua : Iwan Sulisty, S.Sos., M.A.**



**Sekretaris : Roby Rakhmadi, S.Sos., M.Si.**



**Anggota : Drs. Aman Toto Dwijono, M.H.**



**2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP)**



**Dra. Ida Nurhaida, M.Si.**  
**NIP.196108071987032001**

**Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 29 Juli 2022**



## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan komisi pembimbing dan penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan sebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 29 Juli 2022  
Yang membuat pernyataan,



Farid Andriansyah Pandu Putra  
1716071060



## RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap Penulis adalah Farid Andriansyah Pandu Putra atau biasa dipanggil dengan Farid atau Rid, sebagai anak pertama dari dua bersaudara, anak dari Bapak Pandu Mandraguna Achmad Putra dan Ibu Rita Dwiani. Lahir di Jakarta, pada tanggal 09 Januari 2000. Penulis memiliki hobi berenang, jalan-jalan, serta membaca buku, dan tidak menyukai berbagai hal yang tidak disukai.

Penulis pernah menyelesaikan pendidikan di Taman Kanak-Kanak (TK) Angkasa 5 pada 2005 di DKI Jakarta. Selanjutnya pernah menamatkan pendidikan di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Pengadilan 2 Kota Bogor pada tahun 2011, menyelesaikan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Budi Mulia Kota Bogor pada tahun 2014, dan menamatkan pendidikan di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 10 Kota Bogor pada tahun 2017. Setelah menamatkan pendidikan sebelumnya, kemudian Penulis melanjutkan pendidikan di Jurusan Hubungan Internasional (S1), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Universitas Lampung, yang terdaftar dan diterima sebagai mahasiswa pada tahun 2017 melalui jalur SBMPTN.

Selama menjadi mahasiswa, Penulis pernah mengikuti kegiatan organisasi luar kampus bernama Ikatan Mahasiswa Bogor Unila (IMBU) sebagai Anggota Organisasi. Penulis selanjutnya pernah mengikuti Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Direktorat Pengkajian Ideologi dan Politik, Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Indonesia pada Desember tahun 2019—Januari 2020 bersama rekan

mahasiswa Rodo Arief Sinaga dan Vincensius Dion P. Ginting, serta mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada tahun 2020 selaku Ketua Kelompok KKN Universitas Lampung di Kota Bogor bersama rekan mahasiswa dari universitas terkait. Penulis pernah mengikuti kegiatan Pekan Kegiatan Mahasiswa (PKM) Universitas Lampung pada tahun 2021 dengan rekan mahasiswa bernama Rodo Arief Sinaga dan Vincensius Dion P. Ginting. Selama berkuliah pun, Penulis membuka usaha sendiri dengan beternak lele, dan membuka usaha bersama keluarga bernama “Kitchen Jengrit,” memperdagangkan berbagai makanan khas dari Indonesia, Timur, dan Barat.

## **MOTTO**

“Victory comes from finding opportunities in problems”

-Sun Tzu-

“Correct your mistake as soon as you have found it”

-Sun Tzu-

“The best person must get love and fear from others, but if you can't, it's better to  
be feared than loved”

- Niccolò Machiavelli-

## **PERSEMBAHAN**

Dengan mengucap puji dan syukur kehadiran Allah SWT.

Penulis persembahkan skripsi ini kepada:

Kedua orang tua dan Adik Penulis, Bapak Pandu Mandraguna Achmad Putra dan Ibu Rita Dwiani, serta Dik Pieri Firdaus Pandu Putra yang selalu mendoakan dan mendukung Penulis dalam meniti kesuksesan kehidupan;

Para Dosen Hubungan Internasional beserta stafnya yang sudah banyak membantu Penulis memberikan keilmuan Hubungan Internasional, serta mempermudah jalan Penulis dari masa awal perkuliahan hingga menempuh kelulusan;

Rekan-rekan Mahasiswa Hubungan Internasional (S1) Angkatan 2017 yang sudah memberikan warna pada kehidupan kampus Penulis;

Serta untuk Almamater tercinta, Jurusan Hubungan Internasional (S1), Universitas Lampung.



## SANWACANA

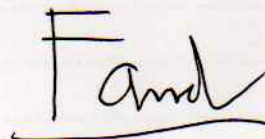
Penulis panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena telah memberikan ridho dan rahmat-Nya, sehingga Penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Skripsi dengan judul “Dilema Keamanan Negara-Negara Anggota Quadrilateral Security Dialogue (QSD) Terkait Modernisasi dan Reformasi Militer Tiongkok, 2017—2020” sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hubungan Internasional di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung. Pada kesempatan kali ini, Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Karomani, M.Si., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Ibu Ida Nurhaida, M.si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Lampung.
3. Ibu Dr. Ari Darmastuti, M.A., selaku Ketua Jurusan Hubungan Internasional (S1), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Lampung.
4. Bapak Drs. Aman Toto Dwijono, M.H., selaku Dosen Pembahas dan Penguji Utama Skripsi yang telah memberikan saran penting terkait skripsi Penulis.
5. Bapak Iwan Sulistyو, S.Sos., M.A., selaku Dosen Pembimbing Utama dan Ketua Penguji Skripsi yang telah memberikan bimbingan kepada Penulis.
6. Bapak Roby Rakhmadi, S.Sos., M.Si., selaku Dosen Pembimbing Pembantu dan Sekretaris Penguji Skripsi yang telah memberikan bimbingan kepada Penulis.
7. Seluruh jajaran Dosen beserta staf Hubungan Internasional (S1), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Lampung yang telah memberikan keilmuan Hubungan Internasional dan membantu urusan administrasi Penulis dari masa awal perkuliahan, masa pengerjaan skripsi, hingga menempuh kelulusan.
8. Kedua orang tua dan Adik Penulis, Bapak Pandu Mandraguna Achmad Putra dan Ibu Rita Dwiani, serta Dik Pieri Firdaus Pandu Putra yang selalu mendoakan dan mendukung Penulis selama pengerjaan skripsi.
9. Muhammad Farikh Ali, Muhammad Ari Ramadhani, Fadli Ekaprima Ariansyah, Muhammad Mikael Atthariq, Cavin Alvian, Ari Sukmajati, Fadhiil Achmad Dani, Muhammad Farhan Maulidan, Bahy Rynar Murfid, Yudi Yusupa, Harjuno

Saputro yang turut membantu dalam memberikan saran dan dukungan terhadap Penulis, dan menjadi teman yang sudah mengisi kehidupan Penulis menjadi lebih berwarna.

10. Rodo Arief Sinaga, Vincensius Dion P. Ginting, Ami Amala, Fauzi Pamungkas, Satria Aji Baskara, Muhammad Bayu, Cyril Noor Mohammad Harahap, Fausta Herlambang, Inas Anisah, Naufal Yulizar, Muhammad Fikri Abdillah, Paskah Manurung, Radina Fitri Lediamelia, Nindy Anistasyia Putri, Bima Xanditama, Nia D., Rachma S., Lovannie Z., Agung S., Fenny F., serta seluruh mahasiswa Hubungan Internasional (S1) angkatan 2017 yang turut membantu penulis dalam memberikan saran dan dukungan terkait hal apapun, serta memberikan kenangan indah bersama pada saat semasa perkuliahan, sampai dengan menjelang kelulusan.
11. Rodo Arief Sinaga, Vincensius Dion P. Ginting, Fakhri Zeidan, Arya, Elza Ainnaya Razak, Ryano Arianda, dan Shelly Wahyu Aulia yang sudah memberikan kenangan indah bersama Penulis pada saat menjadi mahasiswa PKL di Lemhannas.
12. Muhammad Dzaky Abiyyu, Yogi Subagja, Aldila, Adita Sukma Ramadhania, Mia Saputra Krisentiana, Mildariezka Salsabila Ramadhan yang sudah memberikan kepercayaan kepada Penulis menjadi Ketua KKN, memberikan dukungan penuh, dan mampu mengikuti arahan dari Penulis, serta memberikan kenangan indah pada saat KKN di Kota Bogor.
13. Seluruh Pihak yang membantu dalam kelancaran dan kesuksesan skripsi, serta telah memberikan kenangan indah semasa perkuliahan kepada Penulis.

Bandar Lampung, 29 Juli 2022



Farid Andriansyah Pandu Putra  
NPM. 1716071060

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	vii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	viii
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>1.1 Latar Belakang</b> .....	1
<b>1.2 Rumusan Masalah</b> .....	7
<b>1.3 Tujuan Penelitian</b> .....	8
<b>1.4 Kegunaan Penelitian</b> .....	8
<b>1.4.1 Kegunaan Teoretis</b> .....	8
<b>1.4.2 Kegunaan Praktis</b> .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	9
<b>2.1 Penelitian Terdahulu</b> .....	9
<b>2.2 Landasan Konseptual</b> .....	17
<b>2.2.1 Security Dilemma (Dilema Keamanan)</b> .....	17
<b>2.2.2 Strategic Partnership (Kemitraan Strategis)</b> .....	20
<b>2.2.3 Military Modernisation (Modernisasi Militer)</b> .....	22
<b>2.2.4 Military Reform (Reformasi Militer)</b> .....	22
<b>2.3 Kerangka Pemikiran</b> .....	24
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	27
<b>3.1 Jenis Penelitian</b> .....	27
<b>3.2 Fokus Penelitian</b> .....	27
<b>3.3 Jenis dan Sumber Data</b> .....	28
<b>3.4 Teknik Pengumpulan Data</b> .....	28
<b>3.5 Teknik Analisis Data</b> .....	28

<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>30</b>
<b>4.1 Modernisasi dan Reformasi Militer Tiongkok.....</b>	<b>30</b>
<b>4.1.1 Faktor Pendorong Modernisasi dan Reformasi Militer                 Tiongkok .....</b>	<b>30</b>
<b>4.1.2 Kebijakan Modernisasi dan Reformasi Militer Tiongkok.                 .....</b>	<b>34</b>
<b>4.1.3 Hasil Kebijakan Modernisasi dan Reformasi Militer                 Tiongkok .....</b>	<b>37</b>
<b>4.2 Dilema Keamanan Negara-Negara Anggota Quadrilateral Security         Dialogue (QSD) Terkait Modernisasi dan Reformasi Militer         Tiongkok .....</b>	<b>56</b>
<b>4.2.1 Penilaian dan Pandangan Amerika Serikat Terkait                 Modernisasi dan Reformasi Militer Tiongkok.....</b>	<b>56</b>
<b>4.2.2 Penilaian dan Pandangan Australia Terkait Modernisasi                 dan Reformasi Militer Tiongkok .....</b>	<b>58</b>
<b>4.2.3 Penilaian dan Pandangan India Terkait Modernisasi dan                 Reformasi Militer Tiongkok.....</b>	<b>59</b>
<b>4.2.4 Penilaian dan Pandangan Jepang Terkait Modernisasi dan                 Reformasi Militer Tiongkok.....</b>	<b>59</b>
<b>4.2.5 Ulasan Mengenai Penilaian dan Pandangan Amerika                 Serikat, Australia, India, Jepang Terkait Modernisasi dan                 Reformasi Militer Tiongkok.....</b>	<b>60</b>
<b>4.2.6 Tindakan Amerika Serikat Terkait Modernisasi dan                 Reformasi Militer Tiongkok.....</b>	<b>69</b>
<b>4.2.7 Tindakan Australia Terkait Modernisasi dan Reformasi                 Militer Tiongkok .....</b>	<b>71</b>
<b>4.2.8 Tindakan India Terkait Modernisasi dan Reformasi                 Militer Tiongkok .....</b>	<b>73</b>
<b>4.2.9 Tindakan Jepang Terkait Modernisasi dan Reformasi                 Militer Tiongkok .....</b>	<b>74</b>



4.2.10	Tindakan Membangkitkan Kembali Kemitraan Strategis Quadilateral Security Dialogue (QSD) oleh AS, Australia, India, dan Jepang .....	76
4.2.11	Identifikasi Tindakan Membangkitkan Kembali Kemitraan Strategis Quadilateral Security Dialogue (QSD) oleh AS, Australia, India, dan Jepang .....	82
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>		<b>84</b>
5.1	<b>Kesimpulan .....</b>	<b>84</b>
5.2	<b>Saran.....</b>	<b>85</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>86</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 2.1 Komparasi Penelitian Terdahulu.....	15

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	26
Gambar 4.1 Struktur Organisasi CMC Lama.....	37
Gambar 4.2 Struktur Organisasi CMC Baru .....	38
Gambar 4.3 Personel Militer Aktif PLA Periode 1975—2019 .....	39
Gambar 4.4 Reformasi Militer Tiongkok Memotong Pusat Komando PLA.....	40
Gambar 4.5 Anggaran Pengeluaran Pertahanan Tiongkok Tahun 2011—2021 .....	51
Gambar 4.6 Anggaran Pertahanan dan GDP Tiongkok Tahun 2012—2021.....	51

## DAFTAR SINGKATAN

AI	: <i>Artificial Intelligence</i>
AS	: Amerika Serikat
ASEAN	: Association of Southeast Asian Nations
C4ISR	: <i>Command, Control, Communications, Computers, Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance</i>
CCG	: China Coast Guard
CMC	: Central Military Commission
CPC	: Communist Party of China
CICMD	: <i>Commission for Integrated Civilian–Military Development</i>
EW	: <i>Electronic Warfare</i>
FOIP	: <i>Free and Open Indo-Pacific</i>
HADR	: <i>Humanitarian Assistance Disaster Relief</i>
LAC	: <i>Line of Actual Control</i>
LCS	: Laut Cina Selatan
LCT	: Laut Cina Timur
NPC	: National People’s Congress
NSS	: National Security Strategy
NIDS	: National Institute of Defense Studies
PAP	: People’s Armed Force
PLA/ PLAA	: People’s Liberation Army
PME	: <i>Professional Military Education</i>



PLAF	: People’s Liberation Army Air Force
PLAN	: People’s Liberation Army Navy
PLARF	: People’s Liberation Army Rocket Force
PLASSF	: People’s Liberation Army Strategic Support Force
PLAJLSF	: People’s Liberation Army Joint Logistic Support Force
QSD	: Quadrilateral Security Dialogue
QUAD	: Quadrilateral Security Dialogue
RBO	: <i>Rules-Based Order</i>
RMA	: <i>Revolution in Military Affairs</i>
SAGAR	: <i>Security and Growth for All in the Region</i>
UAV	: <i>Unmanned Aerial Vehicle</i>
UGVs	: <i>Unmanned Ground Vehicles</i>
USVs	: <i>Unmanned Surface Vehicles</i>
UCAVs	: <i>Unmanned Chinese Armed Drones</i>

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Quadrilateral Security Dialogue (QSD) atau *Quad* merupakan kerja sama kemitraan yang dibentuk pada tahun 2007 di Filipina beranggotakan empat negara, seperti Amerika Serikat, Australia, India, dan Jepang yang memiliki visi menciptakan nilai-nilai kebebasan dan kemakmuran (*arc of freedom and prosperity*) di Kawasan Indo-Pasifik (Envall, 2019, p. 3). QSD sempat vakum setahun setelah terbentuknya kerja sama tersebut yang disebabkan oleh mundurnya anggota dari QSD dikarenakan perubahan kebijakan masing-masing negara atas politik luar negeri yang dipengaruhi oleh politik domestik pada masing-masing negara (Smith J. M., 2020, p. 4). Pada November tahun 2017, QSD hadir kembali dengan visi “*Free and Open*” di Kawasan Indo-Pasifik (Smith J. M., 2020, p. 7).

Amerika Serikat (AS), Australia, India, Jepang masing-masing mempunyai pandangan dari kehadiran kerja sama kemitraan QSD. AS mengkomitmenkan QSD sebagai kerja sama kemitraan yang bertumpu pada landasan nilai dan prinsip demokrasi bersama, dan dialog untuk memperkuat tatanan berbasis aturan di Kawasan Indo-Pasifik (Government of the United States of America, 2017). QSD dipandang oleh AS sebagai tempat berdiskusi mengenai visi bersama untuk meningkatkan kemakmuran dan keamanan, secara bebas dan terbuka di Kawasan Indo-Pasifik (Government of the United States of America, 2017). Berdasarkan pandangannya tersebut, QSD didorong untuk berperan dalam menegakkan ketertiban berbasis aturan, meningkatkan konektivitas yang sesuai dengan standar hukum dan standar internasional, mengkoordinasikan upaya kontraterorisme dan keamanan maritim, serta membatasi tindakan proliferasi dan tindakan melanggar hukum di Kawasan Indo-Pasifik (Government of the United States of America, 2017).

Australia mengkomitmenkan QSD sebagai untuk dilakukannya dialog dan memperdalam kerja sama berdasarkan nilai dan prinsip bersama (Australian Government, 2017). QSD dipandang oleh Australia sebagai kerja sama empat negara, yang mempunyai visi bersama meningkatkan kemakmuran, keamanan, bebas dan terbuka di Kawasan Indo-Pasifik (Australian Government, 2017). Berdasarkan pandangan Australia, QSD dibentuk untuk mencapai tujuan bersama dan mengatasi tantangan bersama di kawasan tersebut, termasuk di dalamnya mengenai penegakan ketertiban berbasis aturan dan menghormati hukum internasional, kebebasan navigasi dan penerbangan, meningkatkan konektivitas, mengatasi ancaman proliferasi, serta mengkoordinasikan upaya untuk mengatasi tantangan melawan terorisme dan menegakkan keamanan maritim di Kawasan Indo-Pasifik (Australian Government, 2017).

India menyatakan QSD sebagai kerja sama kemitraan untuk konsultasi mengenai isu-isu yang menjadi kepentingan bersama (Government of India, 2017). QSD dipandang oleh India sebagai kerja sama yang disepakati bersama untuk melayani kepentingan jangka panjang semua negara di kawasan dan global secara bebas, terbuka, makmur, dan inklusif, serta memakai “*Act East Policy*” sebagai landasan keterlibatan India di Kawasan Indo-Pasifik (Government of India, 2017). Berdasarkan pandangannya tersebut, QSD difokuskan oleh India sebagai kerja sama berdasarkan visi dan nilai yang menyatu untuk mempromosikan perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran yang akan meningkatkan interkoneksi antar mitranya, serta mengatasi tantangan bersama terorisme dan proliferasi (Government of India, 2017).

QSD dikomitmenkan oleh Jepang sebagai untuk dilakukannya kerja sama dan dialog yang berdasarkan nilai dan prinsip bersama (Government of Japan, 2017). QSD dipandang oleh Jepang sebagai kerja sama yang membahas langkah-langkah untuk memastikan tatanan internasional yang bebas dan terbuka berdasarkan aturan hukum yang ada di Kawasan Indo-Pasifik (Government of Japan, 2017). Berdasarkan pandangan yang disampaikan Jepang, QSD dibentuk untuk menegakkan ketertiban berbasis aturan dan menghormati hukum internasional, mengatasi ancaman proliferasi, melawan terorisme, serta memastikan

kebebasan navigasi dan keamanan maritim di Kawasan Indo-Pasifik (Government of Japan, 2017).

Selain pernyataan masing-masing negara terkait pandangannya terhadap kehadiran kerja sama kemitraan QSD, Penulis juga mengungkapkan pandangan dari beberapa peneliti mengenai kehadiran kerja sama QSD. Jeff M. Smith berpendapat bahwa QSD bangkit sepadan dengan meningkatnya kekhawatiran dan persepsi ancaman bersama terkait kebijakan asertif Tiongkok, hal ini menjadi dorongan bagi AS, Australia, Jepang, dan India bersatu di dalam QSD untuk mengupayakan penyeimbangan terpadu dan kembali mewujudkan visi “*Free and Open Indo-Pacific*” (FOIP) mereka (Smith J. M., 2020, pp. 7—9). QSD digambarkan sebagai jaringan kerja sama strategis dan pertahanan yang mumpuni di antara empat negara anggotanya untuk melawan berbagai kebijakan asertif Tiongkok dan memastikan Kawasan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka (Smith J. M., 2020, p. 16).

Takashi Miyagi mengungkapkan, kebangkitan QSD dikontribusi besar oleh persepsi ancaman mengenai peningkatan kekuatan militer Tiongkok oleh AS, Australia, India, dan Jepang (Miyagi, 2019, p. 37), hal tersebut dikarenakan perkembangan kemampuan, kebijakan, serta kegiatan militer Tiongkok di Kawasan Indo-Pasifik dianggap agresif dan tidak transparan (Miyagi, 2019, p. 28). QSD didefinisikan oleh Takashi Miyagi sebagai kemitraan strategis yang memiliki fokus khusus pada kawasan Indo-Pasifik, dan tujuan dari masing-masing negara anggota QSD yang teridentifikasi adalah untuk mempromosikan Kawasan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka, serta meningkatkan hubungan dengan negara-negara di kawasan tersebut dalam visi FOIP dan kebijakan “*Act East*” (Miyagi, 2019, pp. 35—37).

Euan Graham berpendapat bahwa QSD mempunyai prospek yang ditentukan oleh kepentingan nasional dan persepsi ancaman yang sejajar di antara negara anggotanya (Graham, et al., 2018, p. 4). Kepentingan bersama QSD adalah pemeliharaan stabilitas di Kawasan Indo-Pasifik melalui pelestarian penyeimbangan kekuatan (Graham, et al., 2018, p. 4). Tiongkok merupakan tantangan utama bagi negara anggota QSD, seperti AS, Australia, India, dan Jepang, serta stabilitas di Kawasan Indo-Pasifik (Graham, et al., 2018, p. 4). QSD



dapat dilihat sebagai suatu bentuk dari ‘*expression of solidarity*’ yang cukup untuk mengkomunikasikan sinyal strategis bersama terkait Tiongkok di Kawasan Indo-Pasifik (Graham, et al., 2018, p. 4). Graham menilai terdapat perbedaan signifikan terkait tingkat dan kedekatan ancaman Tiongkok, serta tanggapan dari negara anggota QSD (Graham, et al., 2018, p. 4). Pendorong dasar di balik kebangkitan QSD adalah kekhawatiran mengenai Tiongkok, hal ini membuat QSD menjadi penting (Graham, et al., 2018, p. 6).

QSD diidentifikasi oleh Jyotsna Mehra telah mengakui secara eksplisit atau terselubung, bahwa Tiongkok menimbulkan ancaman strategis pada *Rules-Based Order* (RBO) di Kawasan Indo-Pasifik, seperti militerisasi yang dilakukan secara besar-besaran di Laut Cina Selatan dan menerapkan taktik ‘*gray zone*’ untuk melakukan kontrol atas wilayah tersebut, serta mengejar kepentingan strategis melalui pemaksaan ekonomi yang membuat negara-negara di Kawasan Indo-Pasifik terjebak hutang dan mengikis kedaulatan mereka (Mehra, 2020, p. 9). Oleh adanya hal tersebut, mendorong komitmen bersama di antara AS, Australia, Jepang, dan India dengan membentuk QSD untuk melindungi RBO, dan melestarikan kebebasan navigasi, nilai-nilai demokrasi, stabilitas, dan keterbukaan di Kawasan Indo-Pasifik (Mehra, 2020, p. 10). Masing-masing negara anggota QSD melihat Tiongkok sebagai “*particular negative subject*” yang tidak disetujui, seperti AS mengidentifikasi Tiongkok sebagai ancaman, sementara Australia, India, dan Jepang tidak secara eksplisit mengidentifikasi Tiongkok sebagai ancaman (Mehra, 2020, p. 10).

Berdasarkan pandangan yang Penulis kutip dari masing-masing negara dan para peneliti mengenai Quadrilateral Security Dialogue (QSD). QSD merupakan kemitraan strategis yang dibangkitkan kembali oleh Amerika Serikat, Australia, India, dan Jepang sebagai tanggapan atas kesamaan pandangan terkait kebijakan Tiongkok yang menjadi isu mereka, yakni telah memberikan kekhawatiran dan ancaman kepada mereka, sehingga mengganggu kepentingan negara-negara di Kawasan Indo-Pasifik, seperti kebijakan peningkatan kekuatan militer Tiongkok yang di dalamnya terdapat perkembangan kemampuan, kebijakan, dan kegiatan militer; kebijakan militerisasi Tiongkok; serta kebijakan Tiongkok dalam pemaksaan ekonomi. Selain itu, QSD dibentuk untuk mencapai tujuan bersama dan

mengatasi tantangan bersama berdasarkan visi dan nilai yang menyatu, yakni “*Free and Open*” di Kawasan Indo-Pasifik. Dikarenakan terdapat fokus penelitian yang dimiliki oleh Penulis, penelitian ini akan melakukan pembatasan penelitian terkait kebijakan Tiongkok atau mengambil salah satu kebijakan Tiongkok, yaitu kebijakan peningkatan kekuatan angkatan bersenjata dalam modernisasi dan reformasi militer Tiongkok sebagai bahan penelitian Penulis,

Kebijakan peningkatan kekuatan angkatan bersenjata dalam modernisasi dan reformasi militer yang dilakukan oleh Tiongkok memicu rasa khawatir dan menjadi ancaman oleh Amerika Serikat, Jepang, Australia, dan India, karena hal tersebut dinilai tidak transparan dan sangat agresif (Miyagi, 2019, p. 28), sehingga mengganggu kepentingan negara-negara di Kawasan Indo-Pasifik. Penilaian dan pandangan atau persepsi yang dimiliki oleh empat negara, dinilai oleh Penulis, memiliki konotasi negatif terkait kebijakan Tiongkok tersebut dan mendorong keempat negara masuk ke dalam kondisi dilema keamanan. *Security dilemma* atau dilema keamanan didefinisikan sebagai situasi ketika negara mempersepsikan negatif terkait peningkatan kekuatan militer oleh negara lain dikarenakan tidak mengetahui motivasi dari negara tersebut itu dilakukan untuk memperkuat pertahanan atau untuk melakukan tindakan menyerang (Synder, 1984, p. 461). Selanjutnya, motivasi yang tidak diketahui dari adanya peningkatan keamanan negara lain membuat aktor negara mengasumsikan hal tersebut sebagai tindakan menyerang, sehingga mendorong reaksi negara yang berusaha untuk mengimbangi peningkatan keamanan dengan kekuatan atau *power* (Synder, 1984, p. 461).

Aksi Tiongkok terkait kebijakan peningkatan kekuatan angkatan bersenjata dalam modernisasi dan reformasi militer membuat reaksi empat negara negara mengusahakan perimbangan kekuatan. Kemitraan strategis QSD hadir sebagai upaya penyeimbangan terpadu oleh empat negara atas kebijakan Tiongkok tersebut (Smith J. M., 2020, pp. 7-9). *Strategic partnership* atau kemitraan strategis merupakan kolaborasi terstruktur antara negara-negara untuk mengambil keuntungan bersama atau untuk menanggapi tantangan keamanan secara efektif (Wilkins, 2012, p. 68). *Strategic partnership* digunakan sebagai strategi ofensif dan strategi defensif untuk meningkatkan kekuatan atau menggunakannya sebagai mencari keamanan dan menahan peningkatan ancaman

(Gajauskaitė, 2013, p. 193). Berdasarkan hal tersebut, Penulis berpendapat bahwa dilema keamanan mendorong keempat negara membangkitkan kembali kemitraan strategis QSD untuk diupayakan sebagai penyeimbang terpadu atas kebijakan peningkatan kekuatan angkatan bersenjata dalam modernisasi dan reformasi militer Tiongkok.

Pada bab ini, penulis menyingkat terkait peningkatan kekuatan angkatan bersenjata dalam modernisasi dan reformasi militer Tiongkok. Tuntutan keamanan dan kebutuhan negara akan peningkatan kapabilitas militer negara atau membuat angkatan bersenjata yang profesional dan militer yang dapat membantunya dalam mengejar tujuan negara menjadi menjadi faktor pendorong adanya modernisasi dan reformasi militer negara ((White, 2011, p. 1) & (Rawat, 2019, p. 67)). Ancaman dan ketidakpastian keamanan yang beragam dan kompleks dari dalam dan luar Tiongkok, serta dari perubahan lingkungan medan perang yang diakibatkan oleh revolusi teknologi dan industri (The State Council Information Office of the People's Republic of China, 2019); militer yang dapat menjaga kepentingan kedaulatan, kepentingan pembangunan, dan keamanan nasional, serta militer yang dapat membawa Tiongkok menggapai "*Chinese Dream*" (Government of the United States of America, 2020, pp. 1, 12); dan Tiongkok yang ingin memiliki militer yang kuat dari sebelumnya atau membangun angkatan bersenjata yang lebih profesional dan militer yang dapat mengejar tujuan negara (Xinhua, 2017); telah mendorong Tiongkok untuk melakukan modernisasi dan reformasi pada militernya.

Presiden Tiongkok, Xi Jinping kemudian mengeluarkan "Resolution of the 19<sup>th</sup> National Congress of the Communist Party of China on the Revised Constitution of the Communist Party of China" yang terdapat kebijakan peningkatan kekuatan militer Tiongkok dalam modernisasi dan reformasi angkatan bersenjata berskala besar pada Oktober tahun 2017 yang mengartikulasikan pentingnya Chinese People's Liberation Army (PLA) menggabungkan pencapaian sains dan teknologi Tiongkok untuk diadopsi pada kekuatan militernya, memasukkan "*Xi Jinping Thought*" sebagai pedoman militer, meningkatkan loyalitas militer dengan partai dan rakyat, angkatan bersenjata yang dapat menjalankan tugas-tugas militer di era baru, dan menaikkan kapabilitas angkatan bersenjata Tiongkok untuk memiliki kualitas "*world-class forces*" ((Xinhua, 2017)

& (Japan National Institute for Defense Studies, 2020, p. 2)). Kebijakan yang dibuat oleh Presiden Xi bertujuan untuk mempersiapkan perjuangan militer Tiongkok di semua arah strategis, menaikkan kekuatan militer Tiongkok setara dengan kekuatan negara lainnya, dan meremajakan kekuatan militer Tiongkok (Government of the United States of America, 2019, p. 6); serta secara aktif mampu beradaptasi dengan lanskap persaingan strategis baru, tuntutan keamanan nasional baru, dan perkembangan peperangan modern (Government of the United States of America, 2020, p. 26). Penguatan kemampuan militer dengan sains dan teknologi akan menjadi kunci untuk mengangkat inferioritas militer Tiongkok terhadap kekuatan militer negara lainnya, serta penggunaan militer dengan sains dan teknologi akan memegang kunci nasib perang di masa depan Tiongkok (Japan National Institute for Defense Studies, 2020, p. 2).

## **1.2 Rumusan Masalah**

Kemitraan strategis Quadrilateral Security Dialogue (QSD) yang beranggotakan negara Amerika Serikat, Jepang, Australia, dan India bangkit sepadan dengan pandangan ‘khawatir dan ancaman’ mengenai kebijakan Tiongkok, salah satunya adalah kebijakan peningkatan kekuatan angkatan bersenjata dalam modernisasi dan reformasi militer Tiongkok, karena dinilai tidak transparan dan agresif, sehingga mengganggu kepentingan negara-negara di kawasan Indo-Pasifik. Penilaian dan pandangan atau persepsi terkait kebijakan Tiongkok membuat keempat negara masuk ke dalam kondisi dilema keamanan dan mendorongnya membentuk kemitraan strategis yang digunakan sebagai penyeimbang terpadu atas kebijakan Tiongkok oleh keempat negara tersebut. Berdasarkan hal yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti merumuskan pertanyaan penelitian, yaitu:

**“Bagaimana dilema keamanan negara-negara anggota *Quadrilateral Security Dialogue* (QSD) terkait modernisasi dan reformasi militer Tiongkok, 2017—2020?”**

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian dari skripsi berjudul “Dilema Keamanan Negara-Negara Anggota Quadrilateral Security Dialogue (QSD) Terkait Modernisasi dan Reformasi Militer Tiongkok, 2017—2020,” yakni:

1. Mendeskripsikan modernisasi dan reformasi militer Tiongkok, 2017—2020.
2. Menganalisis dilema keamanan dari negara-negara yang tergabung dalam Quadrilateral Security Dialogue (QSD) terkait modernisasi dan reformasi militer Tiongkok, 2017—2020.

### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian dari skripsi berjudul “Dilema Keamanan Negara-Negara Anggota Quadrilateral Security Dialogue (QSD) Terkait Modernisasi dan Reformasi Militer Tiongkok, 2017—2020,” yakni:

#### **1.4.1 Kegunaan Teoretis**

Penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan dilema keamanan yang dialami negara-negara anggota QSD terkait modernisasi dan reformasi militer Tiongkok, kemudian dari adanya tersebut mendorong AS, Australia, Jepang, dan India bersatu di dalam kemitraan strategis Quadrilateral Security Dialogue (QSD).

#### **1.4.2 Kegunaan Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan referensi bagi para researcher dan policy maker mengenai dilema keamanan yang dialami oleh negara-negara anggota Quadrilateral Security Dialogue (QSD) terkait modernisasi dan reformasi militer Tiongkok, 2017—2020.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Penelitian Terdahulu**

Penelitian menggunakan lima penelitian terdahulu sebagai literatur yang relevan dengan penelitian Penulis. Penelitian yang pertama adalah sebuah jurnal berjudul “*China's Military Increase: A Security Dilemma in Asia Pacific*,” ditulis oleh Mufidah Fariani dan Badrus Sholeh, dipublikasikan pada November 2020. Jurnal ini bertujuan untuk menjelaskan perimbangan kekuatan yang dilakukan oleh negara melalui peningkatan kekuatan militer mengakibatkan dilema keamanan pada negara, khususnya Tiongkok, Jepang, dan Indonesia. Jenis penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif, dan memakai teori *offense-defense*, serta konsep *security dilemma* untuk menjelaskan perimbangan kekuatan yang dilakukan oleh negara dan menganalisis terkait peningkatan kekuatan militer menjadi sebab munculnya dilema keamanan pada negara.

Penelitian ini berfokus pada penguraian mengenai peningkatan kekuatan militer Tiongkok yang didorong oleh persaingan keamanan dan kompetisi perlombaan senjata di Kawasan Indo-Pasifik, serta menganalisis dilema keamanan yang ditunjukkan Jepang dan Indonesia terkait peningkatan kekuatan militer Tiongkok. Kesimpulan dari penelitian ini adalah peningkatan kekuatan militer yang dilakukan oleh Tiongkok dipersepsikan ancaman oleh Jepang dan kebangkitan militer Tiongkok membuat Jepang tertekan, hal ini membuat dilema keamanan bagi negara tersebut. Mufidah dan Badrus menyarankan Jepang untuk bertindak defensif yang akan membuat dirinya merasa lebih aman dengan berusaha mengimbangi kekuatan militer Tiongkok melalui peningkatan kekuatan militer. Indonesia menganggap peningkatan kekuatan militer Tiongkok merupakan ancaman bagi kestabilan keamanan di Kawasan Indo-Pasifik, hal ini mendorong dilema

keamanan. Mufidah dan Badrus menyarankan Indonesia untuk bertindak secara “*low profile*,” yakni melakukan tindakan diplomatis terhadap Tiongkok, serta melakukan kerja sama kemitraan strategis untuk meningkatkan kepercayaan kedua negara dan membangun kesamaan persepsi terhadap isu keamanan kawasan.

Perbedaan penelitian Mufidah dan Badrus dengan penelitian Penulis yaitu fokus penelitian. Jika fokus penelitian jurnal Mufidah dan Badrus merupakan penguraian mengenai peningkatan kekuatan militer Tiongkok yang didorong oleh persaingan keamanan dan kompetisi perlombaan senjata di Kawasan Indo-Pasifik, serta menganalisis dilema keamanan yang ditunjukkan Jepang dan Indonesia terkait peningkatan kekuatan militer Tiongkok, maka fokus penelitian Penulis akan menguraikan dan menganalisis mengenai dilema keamanan dari negara-negara yang tergabung dalam Quadrilateral Security Dialogue (QSD) terkait modernisasi dan reformasi militer Tiongkok, dan juga mendorongnya membentuk kemitraan strategis QSD.

Penelitian yang kedua adalah sebuah jurnal yang berjudul “*The Quad 2.0: A Foundation for a Free and Open Indo-Pacific*,” ditulis oleh Jeff M. Smith, seorang peneliti dari South Asia in the Asian Studies Center, of the Kathryn and Shelby Cullom Davis Center for National Security and Foreign Policy di The Heritage Foundation. Jurnal yang ditulis pada Juli 2020 ini bertujuan untuk menguraikan pembentukan dan keruntuhan Quadrilateral Security Dialogue (QSD), menganalisis pendefinisian QSD, peran dan kritik terhadap *Quad*, serta memberikan saran untuk memperkuat QSD. Jenis penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dan memakai konsep *strategic partnership*.

Penelitian ini berfokus pada menganalisis pendefinisian dan peran QSD. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Quadrilateral Security Dialogue (QSD) dibentuk oleh negara Amerika Serikat, Jepang, Australia, dan India pada tahun 2007 untuk menjalankan visi kemitraan strategis baru melihat evolusi signifikan dalam lanskap keamanan Indo-Pasifik dan merefleksikan hubungan alami antara empat negara dalam berbagi nilai-nilai fundamental dan kepentingan pada pertumbuhan perekonomian negara. Kemunculan QSD dilandasi oleh munculnya persepsi ancaman ‘*vis-à-vis*’ atas Tiongkok. *Quad* digambarkan sebagai simbolis

dan substantif penting bagi jaringan kerja sama strategis dan pertahanan yang sangat mumpuni antara empat negara di kawasan Indo-Pasifik. QSD menikmati kemauan dan kemampuan politik, ekonomi, dan militer untuk melawan berbagai bentuk keasertifan Tiongkok dan memastikan bahwa Kawasan Indo-Pasifik tetap bebas dan terbuka.

Perbedaan penelitian Smith dan penelitian Penulis yaitu fokus penelitian. Jika fokus penelitian jurnal Smith merupakan menguraikan definisi dan peran QSD, maka fokus penelitian Penulis akan menguraikan dan menganalisis mengenai dilema keamanan dari negara-negara yang tergabung dalam Quadrilateral Security Dialogue (QSD) terkait modernisasi dan reformasi militer Tiongkok, dan juga mendorongnya membentuk kemitraan strategis QSD.

Penelitian yang ketiga adalah sebuah *research paper* yang berjudul “*The Sino-American World Conflict*,” ditulis oleh Peter Rudolf, senior researcher dari German Institute for International and Security Affairs. *Research paper* yang ditulis pada tahun 2020 ini bertujuan untuk memahami konflik Amerika Serikat-Tiongkok yang berkembang dalam tataran global dan struktur sindrom konflik yang mendasarinya, dimensi dan dinamika persaingan strategis AS-Tiongkok, serta prospek dan konsekuensi dari kehadiran konflik yang dihasilkan oleh kedua negara bagi politik internasional. Jenis penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan memakai teori *power transition*, serta konsep *security dilemma*, dan *strategic rivalry*.

Penelitian ini berfokus pada menguraikan dan menganalisis hal yang menjadi dasar konflik dari Amerika-Serikat-Tiongkok dalam tataran global, dimensi dan dinamika persaingan strategis AS-Tiongkok, serta prospek dan konsekuensi dari kehadiran konflik kedua negara pada politik internasional. Kesimpulan dari penelitian ini adalah AS menganggap Tiongkok sebagai kekuatan revisionis yang berjuang menjadi kekuatan hegemoni di Kawasan Indo-Pasifik dan supermisi global, serta mempersepsikan kebangkitan Tiongkok sebagai “*unique challenge*” yang mengancam dominasi tradisional AS di Pasifik Barat dan Asia Timur. Kompetisi strategis yang terus dilakukan Tiongkok-Amerika Serikat dikritik membawa mental ‘Perang Dingin.’ Struktur dasar dari sindrom konflik



kedua negara berbasis pada kompetisi strategis memperebutkan status hegemoni pada sistem internasional secara ekonomi dan militer, persaingan ideologi, serta peningkatan kekuatan militer Tiongkok yang membawa dilema keamanan bagi AS. Hubungan Amerika Serikat-Tiongkok dapat diartikan sebagai suatu persaingan strategis yang kompleks. Kedua negara tidak hanya bersaing untuk kekuasaan dan pengaruh, tetapi juga merupakan lawan militer yang potensial. Persaingan strategis mereka memiliki dimensi regional, dimensi global, dan dimensi teknologi. Prospek persaingan strategis antara Amerika Serikat-Tiongkok merupakan struktur konflik global yang berpotensi merisikokan ekonomi dan militer global. Eskalasi konflik yang terus meningkat akan mempengaruhi pergeseran sistem internasional multipolar ke arah sistem internasional bipolar.

Perbedaan penelitian Rudolf dengan penelitian Penulis yaitu fokus penelitian. Jika fokus penelitian *research paper* dari Rudolf merupakan uraian dan analisis terkait hal yang menjadi dasar konflik dari Amerika-Serikat-Tiongkok dalam tataran global, dimensi dan dinamika persaingan strategis AS-Tiongkok, serta prospek dan konsekuensi dari kehadiran konflik kedua negara pada politik internasional. maka fokus penelitian Penulis akan menguraikan dan menganalisis mengenai dilema keamanan dari negara-negara yang tergabung dalam Quadrilateral Security Dialogue (QSD) terkait modernisasi dan reformasi militer Tiongkok, dan juga mendorongnya membentuk kemitraan strategis QSD.

Penelitian yang keempat adalah sebuah tesis yang berjudul “*The Changing Security Dynamics in the Indo-Pacific: The Re-Emergence of the Quadrilateral Security Dialogue*,” ditulis Takashi Miyagi, seorang mahasiswa dari International Relations, Department of Global Political Studies Bachelor Programme di Malmö University. Tesis yang ditulis pada 2019 ini bertujuan untuk menyelidiki faktor-faktor yang menjelaskan munculnya kembali QSD dengan mensintesis beberapa teori *alignment/* aliansi dalam Hubungan Internasional. Jenis penelitian menggunakan metode kuantitatif analisis konten dan memakai teori *alignment/* *alliance*.

Penelitian ini berfokus pada menganalisis dua faktor utama yang berkontribusi pada kemunculan kembali QSD, yaitu persepsi ancaman bersama

terhadap Tiongkok dan tujuan bersama di kawasan Indo-Pasifik. Kesimpulan dari penelitian ini adalah peningkatan perekonomian, keasertifan dalam kebijakan luar negeri, dan keagresifan modernisasi kemampuan militer Tiongkok memainkan peran penting dalam membentuk persepsi ancaman suatu negara terhadap negara lain, dan memberikan kontribusi besar untuk menciptakan kondisi *strategic partnership* terbentuk, yakni Quadrilateral Security Dialogue (QSD). Semua tujuan keempat negara anggota QSD memiliki fokus pada kawasan Indo-Pasifik, dan di antara delapan tujuan QSD yang teridentifikasi, QSD memperhatikan secara khusus pada promosi *Free and Open Indo-Pacific* (FOIP).

Perbedaan penelitian Miyagi dan penelitian Penulis yaitu fokus penelitian, metode penelitian, dan teori/ konsep penelitian. Jika fokus penelitian tesis Miyagi adalah menganalisis dua faktor utama yang berkontribusi pada kemunculan kembali QSD, yaitu persepsi ancaman bersama terhadap Tiongkok dan tujuan bersama di kawasan Indo-Pasifik., maka fokus penelitian Penulis adalah mengurai dan menganalisis mengenai dilema keamanan dari negara-negara yang tergabung dalam Quadrilateral Security Dialogue (QSD) terkait modernisasi dan reformasi militer Tiongkok, dan juga mendorongnya membentuk kemitraan strategis QSD. Metode penelitian Miyagi adalah kuantitatif analisis konten, maka metode penelitian Penulis adalah kualitatif deskriptif. Serta teori penelitian Miyagi memakai *alignment/* aliansi, maka konsep penelitian Penulis memakai *security dilemma* dan *strategic partnership*.

Penelitian yang kelima adalah sebuah jurnal yang berjudul “*The Australia-India-Japan-US Quadrilateral: Dissecting the China Factor*,” ditulis oleh Jyotsna Mehra, seorang peneliti dari Observer Research Foundation. Jurnal yang ditulis pada Agustus 2020 ini bertujuan untuk meneliti Tiongkok yang menjadi faktor pendorong kebijakan negara anggota QSD di kawasan Indo-Pasifik. Jenis penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dan memakai konsep *foreign policy*.

Penelitian ini berfokus pada menganalisis faktor Tiongkok terhadap paksaan domestik di Australia, India, Jepang, dan Amerika Serikat yang mempengaruhi posisi keempat negara dalam forum Quadrilateral Security Dialogue (QSD). Kesimpulan dari penelitian ini adalah kepentingan QSD memiliki

konvergensi yang paralel dengan peningkatan realisasi risiko yang ditimbulkan oleh Tiongkok dan tatanan internasional berbasis kekuatan baru, yang telah menggantikan ‘*Rules-Based Order*’ (RBO). Terlepas dari konvergensi dan pengakuan bersama atas ancaman yang ditimbulkan oleh Tiongkok, QSD menghadapi beberapa tantangan yang disebabkan oleh kebutuhan untuk menyeimbangkan persaingan dan kerja sama dengan Tiongkok. Peningkatan agresi Tiongkok di kawasan Indo-Pasifik telah memberikan bentuk dan makna baru pada *the Quad* dan diakui sebagai “*particular negative subject*” yang tidak disetujui oleh keempat negara tersebut. India, Australia, dan Jepang tidak secara eksplisit mengidentifikasi Tiongkok sebagai aktor ancaman, tetapi lain halnya dengan Amerika Serikat. Konsep QSD tentang Indo-Pasifik adalah konsep inklusif yang tidak mengecualikan Tiongkok. Empat negara anggota QSD dinyatakan oleh Mehra, sering menghilangkan tanda hubung Kawasan Indo-Pasifik dan *the Quad* sebagai forum ‘*Asian NATO*’ melawan Tiongkok.

Perbedaan penelitian Mehra dan penelitian Penulis yaitu fokus penelitian dan teori/ konsep penelitian. Jika fokus penelitian penelitian jurnal Mehra merupakan menguraikan faktor Tiongkok terhadap paksaan domestik di Australia, India, Jepang, dan Amerika Serikat yang mempengaruhi posisi keempat negara dalam forum Quadrilateral Security Dialogue (QSD), maka fokus penelitian Penulis akan menguraikan dan menganalisis mengenai dilema keamanan dari negara-negara yang tergabung dalam Quadrilateral Security Dialogue (QSD) terkait modernisasi dan reformasi militer Tiongkok, dan juga mendorongnya membentuk kemitraan strategis QSD. Serta konsep penelitian Mehra memakai *foreign policy*, maka konsep penelitian Penulis memakai *security dilemma* dan *strategic partnership*.

**Tabel 2.1 Komparasi Penelitian Terdahulu**

Penulis	Mufidah Fariani dan Badrus Sholeh	Jeff M. Smith	Peter Rudolf	Takashi Miyagi	Jyotsna Mehra
Judul	<i>China's Military Increase: A Security Dilemma in Asia Pacific.</i>	<i>The Quad 2.0: A Foundation for a Free and Open Indo-Pacific.</i>	<i>The Sino-American World Conflict.</i>	<i>The Changing Security Dynamics in the Indo-Pacific: The Re-Emergence of the Quadrilateral Security Dialogue.</i>	<i>The Australia-India-Japan-US Quadrilateral: Dissecting the China Factor.</i>
Metode Penelitian	Kualitatif deskriptif.	Kualitatif deskriptif.	Kualitatif deskriptif.	Kuantitatif analisis konten.	Kualitatif deskriptif.
Teori/ Konsep	<i>Offense-defense dan security dilemma.</i>	<i>Strategic partnership.</i>	<i>Power transition, security dilemma, dan strategic rivalry.</i>	<i>Alignment/ alliance.</i>	<i>Foreign policy.</i>
Fokus Penelitian	Peningkatan kekuatan militer Tiongkok menjadi faktor pendorong dilema keamanan bagi Jepang dan Indonesia.	Definisi dan peran QSD	Struktur dasar dari sindrom konflik, dimensi dan dinamika persaingan strategis, serta prospek dan konsekuensi Tiongkok-AS pada tataran global.	Persepsi ancaman bersama QSD terhadap Tiongkok dan tujuan bersama QSD di kawasan Indo-Pasifik.	Faktor Tiongkok terhadap paksaan domestik di Australia, India, Jepang, dan Amerika Serikat yang mempengaruhi posisi empat negara dalam forum QSD.

Sumber: Tabel komparasi penelitian diolah oleh Penulis, serta data di dalam tabel dikutip dari jurnal dan *research*: Mufidah Fariani dan Badrus Sholeh berjudul “*China's Military Increase: A Security Dilemma in Asia Pacific*,” Jeff M. Smith berjudul “*The Quad 2.0: A Foundation for a Free and Open Indo-Pacific*,” Peter Rudolf berjudul “*The Sino-American World Conflict*,” Takashi Miyagi berjudul “*The Changing Security Dynamics in the Indo-Pacific: The Re-Emergence of the Quadrilateral Security Dialogue*,” Jyotsna Mehra berjudul *The Australia-India-Japan-US Quadrilateral: Dissecting the China Factor*; digunakan untuk memudahkan dalam membaca dan memahami *literature review* yang telah ditulis.

Tabel 2.1 (lanjutan)

Penulis	Mufidah Fariani dan Badrus Sholeh	Jeff M. Smith	Peter Rudolf	Takashi Miyagi	Jyotsna Mehra
Kesimpulan	Peningkatan kekuatan militer Tiongkok dipersepsikan mengancam keamanan Jepang dan Indonesia. Jepang disarankan untuk bertindak defensif, dan Indonesia disarankan untuk membangun kerja sama strategis dengan Tiongkok.	QSD dilandasi oleh munculnya persepsi ancaman ‘ <i>vis-à-vis</i> ’ atas Tiongkok, serta digambarkan sebagai simbolis dan substantif penting bagi jaringan kerja sama strategis dan pertahanan di kawasan Indo-Pasifik.	Konflik yang terjadi antara AS-Tiongkok merupakan persaingan strategis pada konteks hegemoni, ideologi, ekonomi, politik internasional, dan militer dalam dinamika regional, global, dan teknologi. Ada kekhawatiran persaingan strategis akan berujung pada konflik dan dapat merubah kondisi geopolitik global.	Peningkatan perekonomian, keasertifan kebijakan luar negeri dan keagresifan militer Tiongkok membentuk persepsi ancaman, serta menciptakan kondisi <i>strategic partnership</i> terbentuk, yaitu QSD yang memiliki tujuan untuk mempromosikan ‘ <i>Free and Open</i> ’ di Kawasan Indo-Pasifik.	Kepentingan QSD memiliki konvergensi yang paralel dengan peningkatan realisasi risiko yang ditimbulkan oleh agresi Tiongkok di kawasan Indo-Pasifik. India, Australia, dan Jepang tidak secara eksplisit mengidentifikasi Tiongkok sebagai ancaman, lain halnya dengan AS.
Perbedaan Penelitian	Fokus penelitian.	Fokus penelitian.	Fokus penelitian.	Fokus penelitian, metode penelitian dan teori/ konsep penelitian.	Fokus penelitian dan teori/ konsep penelitian.

Sumber: Tabel komparasi penelitian diolah oleh Penulis, serta data di dalam tabel dikutip dari jurnal dan *research*: Mufidah Fariani dan Badrus Sholeh berjudul “*China's Military Increase: A Security Dilemma in Asia Pacific*,” Jeff M. Smith berjudul

“*The Quad 2.0: A Foundation for a Free and Open Indo-Pacific*,” Peter Rudolf berjudul “*The Sino-American World Conflict*,” Takashi Miyagi berjudul “*The Changing Security Dynamics in the Indo-Pacific: The Re-Emergence of the Quadrilateral Security Dialogue*,” Jyotsna Mehra berjudul *The Australia-India-Japan-US Quadrilateral: Dissecting the China Factor*; digunakan untuk memudahkan dalam membaca dan memahami *literature review* yang telah ditulis.

## 2.2 Landasan Konseptual

Landasan konseptual yang akan dipakai dalam penelitian ini adalah *security dilemma*, *strategic partnership*, *military modernisation*, dan *military reform*.

### 2.2.1 *Security Dilemma* (Dilema Keamanan)

*Security dilemma* merupakan salah satu gagasan teoretis terpenting dalam hubungan internasional. Herbert Butterfield, John Herz, dan Robert Jervis merupakan penggagas utama dalam mengembangkan konsep *security dilemma*, konsep tersebut telah diperluas dan diterapkan untuk mengatasi banyak pertanyaan penting dari teori hubungan internasional dan kebijakan keamanan (Tang, *A Theory of Security Strategy for Our Time: Defensive Realism*, 2010, p. 33). Butterfield menguraikan dua aspek *security dilemma*, seperti (1) sumber utama *security dilemma* merupakan rasa takut dari “*universal sin of humanity*,” (2) *security dilemma* membutuhkan ketidakpastian akan niat negara lain, (Tang, *A Theory of Security Strategy for Our Time: Defensive Realism*, 2010, p. 35).

John Herz menjelaskan bahwa negara harus memperhatikan keamanan mereka dari ancaman serangan, penaklukan, dominasi, atau pemusnahan dari negara lain (Tang, *A Theory of Security Strategy for Our Time: Defensive Realism*, 2010, pp. 35-36). Adanya ancaman tersebut membuat negara berusaha keras untuk menciptakan keamanannya, hal tersebut mendorong negara untuk mendapatkan lebih banyak kekuatan demi menghindari ancaman-ancaman yang dihasilkan oleh negara lain (Tang, *A Theory of Security Strategy for Our Time: Defensive Realism*, 2010, p. 36), kemudian usaha keras negara tersebut dalam menciptakan keamanannya sendiri, nyatanya mempengaruhi negara lain menjadi tidak aman dan memaksa mereka bersiap untuk menghadapi hal terburuk (Tang, *A Theory of Security Strategy for Our Time: Defensive Realism*, 2010, p. 36).

Dikarenakan tidak ada negara yang merasa sepenuhnya aman dari dunia yang penuh akan persaingan kekuatan, maka lingkaran setan dari *security dilemma* akan terus menerpa negara-negara (Tang, *A Theory of Security Strategy for Our Time: Defensive Realism*, 2010, p. 36). Herz berpendapat *security dilemma* diawali dari ketidakpastian dan rasa ancaman, serta “*homo homini lupus*” sebagai fakta utama kehidupan sosial negara (Tang, *A Theory of Security Strategy for Our Time: Defensive Realism*, 2010, p. 36). John Herz menguraikan tiga aspek *security dilemma*, seperti (1) sumber utama dari *security dilemma* adalah anarki, (2) penyebab langsung dari *security dilemma* adalah ketidakpastian dan ketakutan negara tentang satu sama lain, (3) negara bersifat ‘*self-help*,’ yakni negara mencoba melepaskan diri dari *security dilemma* dengan mengembangkan kekuatan yang lebih besar (Tang, *A Theory of Security Strategy for Our Time: Defensive Realism*, 2010, p. 36).

Robert Jervis mendefinisikan *security dilemma* sebagai konsekuensi hal yang tidak disengaja dan tidak diinginkan dari tindakan yang dimaksudkan untuk defensif, tetapi peningkatan keamanan negara berdampak pada menurunnya tingkat keamanan negara lain, bahkan mengancam keamanan negara lain tersebut (Tang, *A Theory of Security Strategy for Our Time: Defensive Realism*, 2010, p. 37). Jervis mendefinisikan tiga aspek *security dilemma*, seperti (1) *security dilemma* berasal dari struktural hubungan internasional yang bersifat anarki, (2) ketidakpastian dan ketakutan negara-negara membentuk dan mempertahankan *security dilemma*, (3) *security dilemma* disebabkan oleh maksud negara akan peningkatan keamanan untuk defensif, dan tidak disengaja dibaca negara lain sebagai maksud lain yang mengancam keamanan negara lain tersebut (Tang, *A Theory of Security Strategy for Our Time: Defensive Realism*, 2010, p. 37).

Negara meningkatkan keamanannya dengan membangun militer, dengan kegunaannya sebagai defensif ataupun ofensif (Jervis, 1976, p. 64). Robert Jervis menerangkan bahwa, meningkatkan postur militer menyerupai agresor, akan mendongkrak status *quo power* ofensif dan

defensif negaranya (Jervis, 1976, p. 64). Tetapi, tentu tidak dapat disimpulkan bahwa kekuatan militer dan persiapannya memiliki maksud untuk menjadi negara agresif (Jervis, 1976, p. 64). Senjata memiliki sifat yang ambigu dan dapat berperan menghasilkan keamanan dan ketidakamanan, sehingga hal tersebut dapat menghasilkan dilema keamanan bagi negara (Jervis, 1976, p. 64).

Glenn H. Synder menyatakan bahwa kemunculan dari *security dilemma* berawal dari tidak dapat memastikan oleh aktor mengenai peningkatan kemampuan militer oleh aktor lain, padahal ditujukan untuk memperkuat pertahanannya saja (Synder, 1984, p. 461). Aktor yang memperkuat pertahanan tidak mempunyai niat pada kemampuan militernya untuk menyerang aktor lain, tetapi niat dari aktor tersebut tidak dapat dipastikan keperluan peningkatan militernya untuk tujuan damai atau untuk melakukan tindakan agresif (Synder, 1984, p. 461). Dikarenakan tidak ada yang mengetahui akumulasi kekuatan militernya dimotivasi secara defensif, maka masing-masing aktor akan mengasumsikan peningkatan kemampuan militer untuk menyerang, akibatnya peningkatan kekuatan atau *power* aktor akan diimbangi pihak aktor lain (Synder, 1984, p. 461).

Nick Weller dan Ken Booth menyatakan ambiguitas dari postur militer negara menghasilkan ketidakpastian yang tidak dapat diselesaikan (Wheeler & Boot, 1992, p. 29). Persiapan militer suatu negara dapat menciptakan ketidakpastian yang tidak dapat diselesaikan di pemikiran negara lain, apakah persiapan tersebut untuk meningkatkan keamanannya atau untuk melemahkan keamanan lawan (Wheeler & Boot, 1992, p. 29). Ketidakpastian menghasilkan ketakutan terhadap pihak lain yang ingin menyakiti aktor negara, sehingga aktor negara gagal memahami niat pihak lain, serta gagal menyadari perasaan dan persepsi yang mereka miliki yang kemudian hal tersebut mendorong lahirnya ketidakamanan (Wheeler & Boot, 1992, p. 29).

Penulis menyimpulkan bahwa *security dilemma* dimaknai sebagai suatu kondisi ketika negara memiliki persepsi negatif terkait peningkatan



kekuatan militer oleh negara lain, sehingga dari adanya hal tersebut membuat negara mencoba berusaha mengembangkan perimbangan kekuatan dengan keberadaan peningkatan kekuatan militer negara lain. Pada penelitian ini, konsep *security dilemma* digunakan untuk menganalisis mengenai dilema keamanan negara-negara anggota Quadrilateral Security Dialogue (QSD) terkait modernisasi dan reformasi militer Tiongkok, 2017—2020.

### 2.2.2 *Strategic Partnership* (Kemitraan Strategis)

*Strategic partnership* yang dikutip dari Anna Michalski, berperan penting dalam membentuk struktur sosial dari sistem internasional, serta menyediakan tempat bagi interaksi bilateral dan realisasi peran internasional (Michalski, 2019, p. 5). *Strategic partnership* membawa sejumlah tujuan, seperti mencapai tujuan kebijakan luar negeri negara, membentuk lingkungan internasional melalui proyeksi norma dan pandangan dunia, serta merealisasikan yang terkait dengan posisi internasional aktor negara dengan meningkatkan status dan reputasi internasional mereka (Michalski, 2019, p. 6). Pembentukan *strategic partnership* mempunyai tujuan utama, yakni sebagai tempat antar mitra untuk mengelola hubungan bilateral dengan membentuk kerangka kerja, yang di dalamnya terdapat keterlibatan diplomatik terstruktur oleh aktor negara untuk memecahkan masalah dan bertukar informasi (Michalski, 2019, p. 6). Michalski memahami *strategic partnership* dipahami sebagai kendaraan yang dipakai untuk mengejar kepentingan strategis negara (Michalski, 2019, p. 7).

Lucyna Czechowska menjelaskan *strategic partnership* sebagai alat kebijakan luar negeri yang memiliki esensi kerja sama di antara aktor negara untuk mencapai tujuan yang sama, serta cara terbaik memudahkan negara untuk memecahkan masalah dan mencapai kepentingan nasionalnya dengan bekerja sama (Czechowska, 2013, p. 42). Czechowska mengkategorisasikan *strategic partnership* sebagai “*sensu largo alliance*,” yang merupakan suatu kondisi aktor negara melakukan upaya solidaritas-terkombinasi untuk

mengimplementasikan suatu tujuan politik bersama atau tujuan saling melengkapi di antara negara dan mitranya (Czechowska, 2013, p. 45). Thomas S. Wilkins mendefinisikan *strategic partnership* sebagai kolaborasi terstruktur antara negara-negara untuk mengambil keuntungan bersama atau untuk menanggapi tantangan keamanan secara efektif (Wilkins, 2012, p. 68).

Gajauskaitė menerangkan tujuan utama dari adanya *strategic partnership* adalah keamanan nasional, serta konsep *strategic partnership* mencerminkan penggunaan kekuatan nasional di dalam kemitraan dengan negara lain, ketika mengupayakan pelaksanaan kepentingan nasional dan kepentingan bersama (Gajauskaitė, 2013, p. 191). Gajauskaitė menjelaskan, dasar kerja sama dari *strategic partnership* adalah *common interest* dan *common security issue/ threats* (Gajauskaitė, 2013, p. 192). Karakteristik dasar dari *strategic partnership* adalah kerja sama keamanan dan ekonomi (Gajauskaitė, 2013, p. 193). Aktor negara memulai *strategic partnership* bertujuan untuk meningkatkan keamanan nasional dan mengurangi ‘*the lack of power*’ (Gajauskaitė, 2013, p. 193).

Sean Kay mendefinisikan *strategic partnership*, dengan memakai perspektif realis defensif, dipahami kemitraan sebagai refleksi negara terkait perilaku peyeimbangan oleh aktor negara (Kay, 2000, p. 16). Ketika aktor negara prihatin tentang keamanan atau posisi relatif internasional mereka, negara sering berusaha untuk meningkatkan kapasitas mereka untuk ‘*self-preservation*,’ melalui langkah-langkah defensif untuk menyeimbangkan terhadap ancaman eksternal, dengan cara kemitraan (Kay, 2000, p. 16).

Penulis menyimpulkan bahwa *strategic partnership* dimaknai sebagai ‘sarana’ yang digunakan negara untuk menciptakan keamanan, menyeimbangkan kekuatan, dan menghilangkan persepsi negatif dari isu keamanan atau hal yang menantang keamanan negara, serta digunakan sebagai ‘sarana’ untuk mengejar kepentingan bersama dan kepentingan masing-masing dari aktor yang berperan di dalam kerja sama. Pada penelitian ini, konsep *strategic partnership* digunakan untuk

mengidentifikasi dan menjelaskan pembentukan kemitraan strategis Quadrilateral Security Dialogue (QSD) sebagai tanggapan atas dilema keamanan empat negara anggotanya terkait modernisasi dan reformasi militer Tiongkok, 2017—2020.

### **2.2.3 *Military Modernisation* (Modernisasi Militer)**

Ancaman regional dan global, serta perubahan lingkungan medan perang menjadi tantangan bagi keamanan negara-negara. Adanya ancaman dan perubahan lingkungan medan perang membawa negara-negara berusaha mengembangkan atau memodernisasi kekuatan angkatan bersenjata untuk menghadapi tantangan tersebut (Rawat, 2019, p. 66). Rawat mendefinisikan *military modernisation* sebagai praktik peningkatan sistem atau *platform* teknologi baru untuk menghadapi tantangan yang akan muncul atau proses perubahan fundamental dari kapasitas angkatan bersenjata untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Rawat, 2019, pp. 66-67).

Penulis menyimpulkan bahwa *military modernisation* dimaknai sebagai proses peningkatan kekuatan militer negara dengan meng-*upgrade* teknologi lama atau mengganti teknologi lama tersebut dengan teknologi baru untuk tujuan menghadapi ancaman di tataran regional dan global, serta perubahan lingkungan medan perang yang menjadi tantangan bagi keamanan negara-negara. Pada penelitian ini, konsep *military modernisation* digunakan untuk mendeskripsikan modernisasi militer Tiongkok, 2017—2020.

### **2.2.4 *Military Reform* (Reformasi Militer)**

Andrew White menyatakan bahwa *military reform* digunakan untuk memperkuat militer negara dengan memprofesionalisasikan angkatan bersenjata (White, 2011, p. 1). Selain itu, mereformasi militer dilakukan untuk membantu negara dalam mengejar tujuan politik dan mendapatkan kekuatan politik. *Military reform* dijelaskan Lieutenant Colonel Samuel A. Whitson, dilakukan negara untuk meningkatkan kekuatan angkatan

bersenjata negara tersebut, demi mencapai tujuan negara, yakni membuat negara aman akan ancaman invasi negara lain (Whitson, 1998, p. 28). Emilija Stankovic berpendapat mengenai *military reform*, sangat perlu dilakukan negara menimbang akan ancaman eksternal dan internal negara yang selalu menghantui, oleh karena itu reformasi dapat membantu membangun kekuatan militer baru yang akan digunakan untuk melindungi negara dari ancaman tersebut (Stankovic, 2012, p. 8). Reformasi militer menurut Von Clausewitz dilakukan untuk membangun kekuatan militer profesional, serta memanfaatkan energi dan bakat rakyatnya untuk meraih tujuan negara (Smith H. , 2004, p. 36).

*Military reform* menurut Emilija Stankovic hanya berfokus pada melakukan inovasi di bidang militer yang dapat memperbaharui kekuatan militer negara, mereorganisasi militer dan menempatkan militer pada posisi strategis yang dilakukan untuk memperkuat pertahanan negara (Stankovic, 2012, p. 59). *Military reform* membawa dampak baik bagi negara, yakni dapat mengoptimalkan jumlah prajurit dan organisasi militer negara, sehingga akan meningkatkan kekuatan pertahanan negara (Stankovic, 2012, p. 59). Sementara itu, Andrew White mencatat tiga hal penting yang perlu dilakukan negara dalam melakukan reformasi militernya, yakni mereorganisasi militer, memodernisasi kekuatan militer, dan meningkatkan pelatihan militer yang ditujukan untuk membentuk angkatan bersenjata berkualitas profesional (White, 2011, p. 7). Lieutenant Colonel Samuel A. Whitson berpendapat bahwa reformasi militer hanya difokuskan pada tingkat strategisnya saja, seperti anggaran militer, industri militer, dan infrastruktur pendukung militer (Whitson, 1998, p. 28).

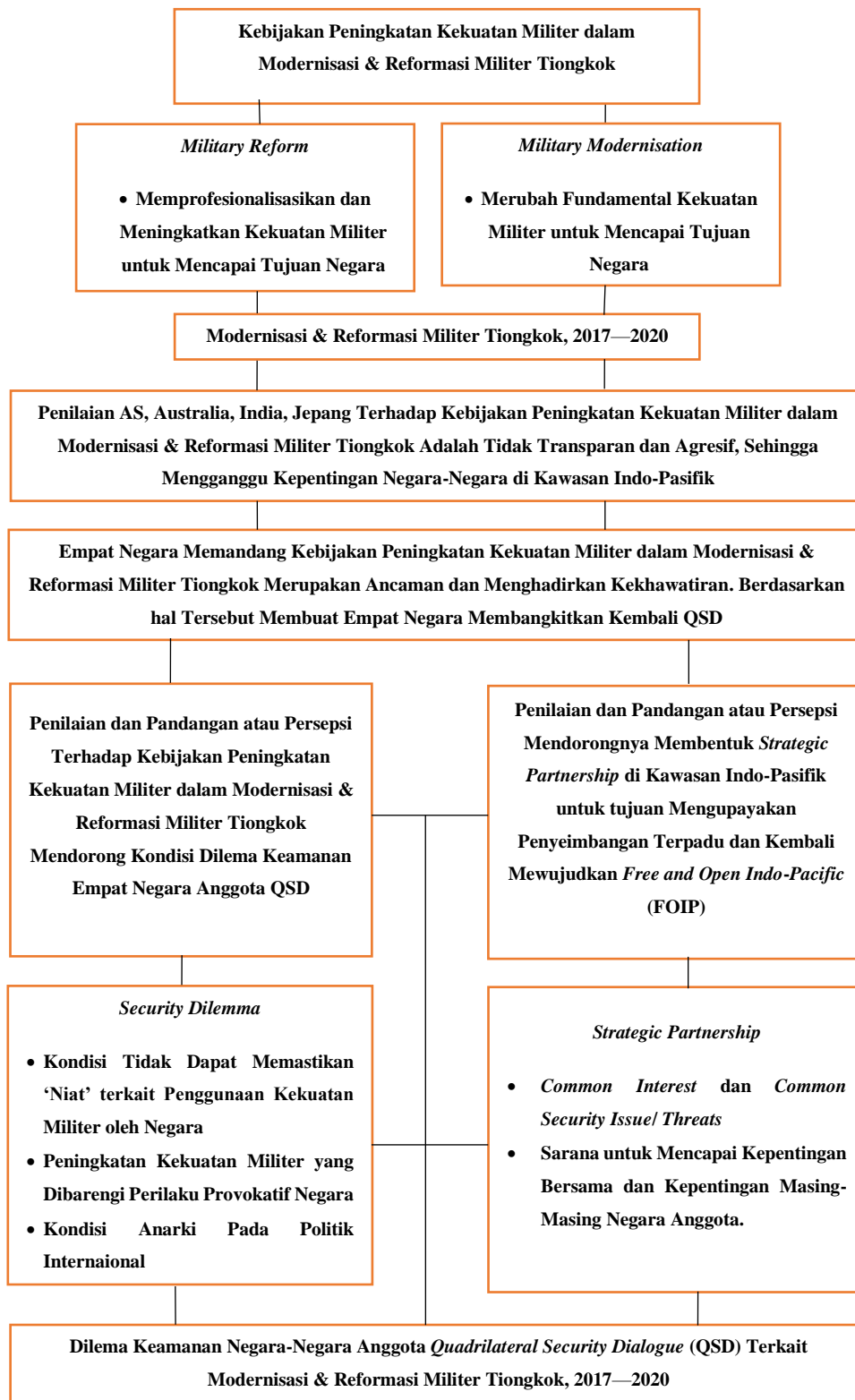
Pada bagian ini akan ditunjukkan bahwa faktor pendorong dari modernisasi dan reformasi militer Tiongkok, yakni ancaman keamanan di internal dan eksternal negara yang selalu menghantui, serta kebutuhan negara akan peningkatan kapabilitas militer negara atau membuat angkatan bersenjata yang profesional dan militer yang dapat membantunya dalam mengejar tujuan negara

Penulis menyimpulkan bahwa *military reform* dimaknai sebagai proses untuk memperkuat militer negara dengan memprofesionalisasikan angkatan bersenjata atau memperbaharui kekuatan militer negara untuk menghilangkan ancaman keamanan di internal dan eksternal negara, militer yang siap dalam menghadapi perubahan lingkungan medan perang, serta dapat memenuhi kebutuhan negara atau mencapai tujuan negara. *Military reform* berfokus pada melakukan inovasi di bidang militer, seperti memodernisasi militer, meningkatkan pelatihan militer, mereorganisasi militer, dan menempatkan militer pada posisi strategis yang dilakukan untuk memperkuat pertahanan negara, serta *military reform* berfokus pada bidang strategis, seperti anggaran militer, industri militer, dan infrastruktur pendukung militer. Pada penelitian ini, konsep *military reform* digunakan untuk mendeskripsikan reformasi militer Tiongkok, 2017—2020.

### **2.3 Kerangka Pemikiran**

Kebijakan peningkatan kekuatan angkatan bersenjata dalam modernisasi dan reformasi militer yang dilakukan oleh Tiongkok bertujuan untuk mencapai tujuan nasionalnya. Penelitian ini akan mendeskripsikan kebijakan peningkatan kekuatan militer dalam modernisasi dan reformasi militer Tiongkok dengan menggunakan konsep *military modernisation* dan *military reform*. AS, Australia, India, dan Jepang menilai hal yang dilakukan Tiongkok tersebut merupakan tindakan agresif dan tidak transparan, sehingga mengganggu kepentingan negara-negara di Kawasan Indo-Pasifik. Penilaian tersebut menjadikan empat negara memiliki pandangan terhadap kebijakan Tiongkok tersebut, yakni menampilkan ancaman dan menimbulkan kekhawatiran. Penilaian dan pandangan atau persepsi terkait kebijakan Tiongkok mendorong keempat negara masuk ke dalam kondisi dilema kemandirian, dan dari hal tersebut juga yang mendorong mereka membentuk kemitraan strategis Quadrilateral Security Dialogue (QSD) untuk tujuan mengupayakan penyeimbangan terpadu dan kembali mewujudkan “*Free and Open Indo-Pacific*” (FOIP). Penelitian ini akan menganalisis mengenai dilema keamanan negara-negara anggota Quadrilateral Security Dialogue (QSD) terkait modernisasi dan reformasi militer Tiongkok, dan juga mendorongnya membentuk kemitraan

strategis QSD, menggunakan konsep *security dilemma* dan konsep *strategic partnership*. Untuk lebih jelasnya, Penulis membuat bagan untuk memahami kerangka pemikiran tersebut:



**Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.**

Sumber: Gambar Kerangka Pemikiran diolah oleh Penulis yang digunakan untuk mempermudah dalam memahami alur pemikiran Penulis pada penelitian.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Penelitian Penulis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Penelitian kualitatif adalah alat untuk mengeksplorasi dan memahami makna individu atau kelompok yang dideskripsikan sebagai masalah sosial atau manusia (Creswell, 2009, p. 4). Penelitian deskriptif merupakan tipe penelitian yang menganalisis fenomena, kemudian dideskripsikan secara lebih mendalam dengan mengkaitkan teori atau konsep berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan, setelahnya dijabarkan dalam bentuk teks (Creswell, 2009, p. 4).

Berdasarkan hal tersebut, Penulis menggunakan pendekatan kualitatif sebagai metodologi untuk mendeskripsikan modernisasi dan reformasi militer Tiongkok dengan konsep *military modernisation* dan konsep *military reform*, serta menganalisis mengenai dilema keamanan negara-negara anggota Quadrilateral Security Dialogue (QSD) terkait modernisasi dan reformasi militer Tiongkok dan juga mendorongnya membentuk kemitraan strategis QSD dengan konsep *security dilemma* dan konsep *strategic partnership*.

#### **3.2 Fokus Penelitian**

Penelitian berfokus pada mendeskripsikan mengenai modernisasi dan reformasi militer yang dilakukan Tiongkok, 2017—2020 memakai konsep *military modernisation* dan konsep *military reform*, serta menganalisis mengenai dilema keamanan dari negara-negara yang tergabung dalam Quadrilateral Security Dialogue (QSD) terkait modernisasi dan reformasi militer Tiongkok dan juga mendorongnya membentuk kemitraan strategis QSD, 2017—2020 memakai konsep *security dilemma* dan konsep *strategic partnership*.



### 3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder, merupakan jenis data yang dikutip dari hasil analisis sebelumnya oleh peneliti ataupun institusi (Bryman, 2012, p. 113). Sumber data sekunder pada penelitian ini akan didapatkan melalui dokumen-dokumen yang dipublikasi oleh pemerintah negara-negara terkait, penelitian-penelitian sebelumnya yang termuat di berbagai jurnal, artikel, tesis, serta berita kredibel berisikan hasil analisis dan opini dari para ahli dan lembaga *think tank*, utamanya ialah RAND Corporation (<https://www.rand.org/>), Center for Strategic & International Studies (<https://www.csis.org/>), The Heritage Foundation (<https://www.heritage.org/#>), Stockholm International Peace Research Institute (<https://www.sipri.org/>), International Institute for Strategic Studies (<https://www.iiss.org/>), dan National Institute for Defense Studies (<https://www.nids.mod.go.jp/english/>), yang akan digunakan untuk memperkaya data penelitian.

### 3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah suatu proses untuk mendapatkan data dari sampel yang dikumpulkan peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian (Bryman, 2012, p. 14). Pendekatan penelitian kualitatif menggunakan studi kepustakaan dan studi dokumentasi untuk digunakan sebagai teknik pengumpulan data. Penulis mengumpulkan data dengan mengutip dari berbagai sumber data sekunder yang termuat pada dokumen-dokumen pemerintah, jurnal, tesis, dan artikel penelitian, serta berita-berita kredibel yang dimuat pada internet. Selanjutnya, jenis data sekunder yang dikutip oleh Penulis akan dianalisis menjadi jawaban dari pertanyaan penelitian.

### 3.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah sebuah proses memahami, menjelaskan, dan menafsirkan data-data yang diperoleh, kemudian dikaitkan dengan teori atau konsep yang dipilih pada penelitian. Berdasarkan metode studi kepustakaan dan studi dokumentasi yang digunakan pada penelitian, teknik analisis data Penulis

memakai model Matthew B. Miles dan Michael Huberman, yaitu (Miles, Huberman, & Saldana, 2014):

### 1. Kondensasi Data (*Data Condensation*)

Kondensasi data merupakan sebuah proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, pengabstraksian, dan perubahan data pada jurnal penelitian, dokumen, dan sumber-sumber empiris lainnya untuk membuat data penelitian lebih kuat, serta mampu dapat menarik kesimpulan dan diverifikasi. Penulis memakai kondensasi data untuk membantu proses pengutipan data kualitatif yang terdapat pada sumber-sumber data sekunder penelitian, dan data tersebut dianalisis untuk menemukan jawaban pada penelitian atau untuk mengetahui tindakan yang akan dilakukan selanjutnya pada penelitian.

### 2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data merupakan kumpulan informasi yang telah diorganisir, kemudian informasi tersebut dikompres untuk mendapatkan penarikan kesimpulan dan tindakan. Penyajian data dirancang untuk mengumpulkan informasi yang sudah diorganisir ke dalam bentuk yang ringkas, mencakup matriks, grafik, teks, tabel, diagram, gambar, dan sebagainya, sehingga analis dapat melihat apa yang terjadi, serta dapat menarik kesimpulan, atau melanjutkan ke langkah analisis berikutnya yang berguna pada penelitian. Penulis memakai penyajian data untuk membantu dalam memahami analisis penelitian kualitatif dan membantu tindakan analisis penelitian kualitatif selanjutnya, agar dapat menuju pada tahap penarikan kesimpulan dalam penelitian kualitatif.

### 3. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

Penarikan kesimpulan merupakan tahap terakhir dalam teknik analisis data model Miles dan Huberman, setelah memperoleh data kualitatif yang telah dikondensasikan, kemudian data tersebut dianalisis, serta penyajian data yang telah dimuat pada penelitian akan dipakai untuk membantu memahami analisis penelitian kualitatif dan membantu tindakan analisis selanjutnya pada penelitian kualitatif. Penulis memakai penarikan kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian dan mendapatkan temuan baru pada penelitian.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Amerika Serikat, Australia, India, dan Jepang menilai peningkatan kekuatan angkatan bersenjata Tiongkok dalam modernisasi dan reformasi militernya ditujukan untuk memajukan kepentingan nasional Tiongkok, menjadi tanpa preseden dan sudah tidak mengikuti lagi nilai-nilai berbasis keterbukaan, inklusif, dan kawasan yang memiliki norma atau hukum, tidak mempunyai mempunyai visi masa depan yang jelas dan spesifik, tidak mempunyai transparansi, menantang kedaulatan negara, memperumit atau meningkatkan perselisihan yang mempengaruhi perdamaian dan stabilitas dari Kawasan Indo-Pasifik, serta digunakan untuk mengubah status *quo* daerah sengketa. Keempat negara memandang tindakan Tiongkok tersebut dapat memberikan ancaman tersirat, memicu ketidakpastian, membuat risiko yang tinggi, provokatif, agresif, asertif, koersif, serta membuat ketegangan dan ketakutan pada negara-negara di Kawasan Indo-Pasifik.

Peningkatan kekuatan angkatan bersenjatanya Tiongkok dalam modernisasi dan reformasi militernya telah membuat Amerika Serikat, Australia, India, dan Jepang berada dalam kondisi dilema keamanan, yakni ketika negara mempersepsikan (penilaian dan pandangan) bahwa hal tersebut bersifat negatif. Persepsi negatif keempat negara didorong oleh: (1) Ketidakpastian tentang 'niat' yang dilatarbelakangi oleh ambiguitas tujuan dari peningkatan kekuatan angkatan bersenjata Tiongkok; (2) Peningkatan kekuatan militer Tiongkok yang juga membawa perilaku provokasi terhadap keempat negara dan Kawasan Indo-Pasifik; (3) Kondisi anarki pada politik internasional yang membuat negara tidak percaya dengan tindakan peningkatan kekuatan militer negara lain.

Dilema keamanan menempatkan negara memunculkan tindakan pertimbangan oleh masing-masing negara dalam menghadapi isu/ tantangan

keamanan dari tindakan Tiongkok berdasarkan strategi/ pendekatan/ visi/ kebijakan luar negeri mereka dengan mengandalkan kekuatan besar nasionalnya; dan tindakan membangkitkan kembali kemitraan strategis Quadrilateral Security Dialogue (QSD) yang digunakan sebagai ‘sarana’ bersama untuk menciptakan keamanan, menyeimbangkan kekuatan, menghilangkan persepsi negatif dari tindakan Tiongkok yang menjadi isu/ menantang keamanan empat negara dan kawasan, serta mengejar kepentingan masing-masing AS, Australia, India, dan Jepang di bawah visi “*Free and Open Indo Pasific (FOIP)*” dan kebijakan “*Act East*” (khusus India) di Kawasan Indo-Pasifik.

## **5.2 Saran**

Berdasarkan penelitian Penulis sebelumnya, Penulis menemukan perilaku dilema keamanan telah mengakibatkan negara-negara melakukan aksi-reaksi perimbangan kekuatan dengan peningkatan kekuatan militer atau menyeimbangkan kekuatan dengan kerja sama di antara negara yang dilakukan untuk membuatnya merasakan dirinya aman, serta menghilangkan rasa takut, khawatir, dan terancam yang datang pada negara. Kondisi dari dilema keamanan yang dialami oleh negara dipastikan akan terus terjadi bilamana negara terus mengulangi perbuatannya atau negara selalu beraksi-bereaksi atas adanya perilaku perimbangan kekuatan yang dilakukan oleh negara. Penulis sangat mengkhawatirkan kondisi tersebut akan mendorong terjadinya konflik, serta mengganggu kestabilan keamanan dan perdamaian pada negara dan politik internasional. Negara disarankan memakai pendekatan persuasif atau membangun hubungan diplomatik di antara negara (bukan dalam konteks perimbangan kekuatan), agar dapat bekerja sama satu sama lain dalam membangun stabilitas keamanan dan perdamaian, serta berkomitmen untuk tidak menyelesaikan masalah keamanan dan perdamaian dengan mengedepankan perimbangan kekuatan atau bentuk-bentuk yang dapat mengganggu kondisi aman dan damai dari negara, sehingga dari adanya hal ini dapat menjadi suatu solusi bagi negara dalam menghilangkan kondisi dilema keamanan, dan hal ini juga dapat mencegah terjadinya konflik, serta dapat berimplikasi positif kepada stabilitas keamanan dan perdamaian negara dan politik internasional.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku:**

- Al Syahrin, M. N. (2018). *Keamanan Asia Timur: Realitas, Kompleksitas, dan Rivalitas*. Sleman: Komojoyo Press.
- Bryman, A. (2012). *Social Research Methods*. New York: Oxford University Press.
- Creswell, J. W. (2009). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. USA: SAGE Publications.
- Czechowska, L., Tyushka, A., Domachowska, A., Gawron-Tabor, K., & Piechowiak-Lamparska, J. (2019). *States, International Organizations, and Strategic Partnership*. Cheltenham: Edward Elgar Publishing .
- Jervis, R. (1976). *Perception and Misperception in International Politics*. New York: Princeton University Press.
- Miles, M. B., Huberman, M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. California: SAGE Publications.
- Roe, P. (2005). *Ethnic Violence and the Societal Security Dilemma*. New York: Routledge: Taylor & Francis Group, 2005.
- Smith, H. (2004). *On Clausewitz: A Study of Military and Political Ideas*. New York: Palgrave Macmillan.
- Tang, S. (2010). *A Theory of Security Strategy for Our Time: Defensive Realism*. New York: Palgrave Macmillan.
- Wheeler, N. J., & Boot, K. (1992). *The Security Dilemma*. Oxford: Clarendon Press.
- Wuthnow, J., & Saunders, P. C. (2017). *Chinese Military Reforms in the Age of Xi Jinping: Drivers, Challenges, and Implications*. Washington, D.C.: National Defense University Press.

### **Jurnal:**

- Czechowska, L. (2013). The Concept of Strategic Partnership as an Input in the Modern Alliance Theory. *The Copernicus Journal of Political Studies* 2013, 04(02), 36—51.
- Edelstein, D. M. (2006). Managing uncertainty: Beliefs about intentions and the rise of great powers. *Security Studies*, 12(01), 01—40.
- Funaiole, M. P., Hart, B., Glaser, B. S., & Chan, B. (2021, March 05). *Understanding China's 2021 Defense Budget*. Retrieved from Central for Strategic & International Studies: <https://www.csis.org/analysis/understanding-chinas-2021-defense-budget>.

- Gajauskaitė, I. (2013). Strategic Partnerships in Foreign Policy: Comparative Analysis of Polish - Ukrainian and Lithuanian - Ukrainian Strategic Partnerships. *Lithuanian Annual Strategic Review*, 11(01), 189—229. doi:10.2478/v10243-012-0028-x
- Jash, A. (2020). China's Military-Civil Fusion Strategy: Building a Strong Nation with a Strong Military. *Claws Journal*, 13(02), 42—62.
- Kay, S. (2000). What Is a Strategic Partnership? *Problems of Post-Communism*, 47(03), 15—24. doi:10.1080/10758216.2000.11655882
- Rana, D. S. (2019). Chinese Defence Reforms and Lessons for India. *Claws Journal*, 12(01), 138—165.
- Rawat, A. S. (2019). Modernisation and Transformation in the Armed Forces. *Claws Journal*, 12(01), 66—76.
- Stankovic, E. (2012). Diolectian's Military Reform. *Legal Studies Journal*, 01(01), 129—141.
- Synder, G. H. (1984, July). World Politics: A Quarterly Journal of International Relations. *The Security Dilemma in Alliance Politics*, 36(04), 461—495.
- Taliaferro, J. W. (2000—2001). Security Seeking under Anarchy: Defensive Realism Revisited. *International Security*, 25(03), 128—161.
- Tang, S. (2008). Fear in International Politics: Two Positions. *International Studies Review*, 10(03), 451—471.
- Wilkins, T. S. (2012). 'Alignment', Not 'Alliance' – the Shifting Paradigm of International Security Cooperation: Toward a Conceptual Taxonomy of Alignment. *Review of International Studies*, 38(1), 53—76. doi:10.1017/S0260210511000209

### **Report dan Research:**

- Australian Government. (2017). *2017 Foreign Policy White Paper*. Department of Foreign Affairs and Trade of Australia.
- Australian Government. (2020). *2020 Defence Strategic Update*. Department of Defence.
- Campbell, C. (2021). *China's Military: The People's Liberation Army (PLA)*. Congressional Research Service.
- Central Committee of the Communist Party of China. (2016). *The 13th Five-Year Plan for Economic and Social Development of the People's Republic of China 2016—2020*. Beijing: Central Compilation & Translation Press.
- Envall, H. (2019). *The Quadrilateral Security Dialogue: Towards an Indo-Pacific Order?* Singapore: S. Rajaratnam School of International Studies (RSIS), Nanyang Technological University.

Government of the United States of America. (2018). *Summary of the National Defense Strategies of the United States of America*. Department of Defense of the United States of America.

Government of India. (2017). *Annual Report 2016-17*. Ministry of Defence of India.

Government of India. (2017). *Annual Report 2016-17*. Ministry of External Affairs of India.

Government of India. (2018). *Annual Report 2017-18*. Ministry of Defence of India.

Government of India. (2019). *Annual Report 2018-19*. Ministry of Defence of India.

Government of India. (2020). *Annual Report 2019-20*. Ministry of External Affairs of India.

Government of India. (2021). *Annual Report 2020-21*. Ministry of External Affairs of India.

Government of Japan. (2017). *Diplomatic Bluebook 2017*. Ministry of Foreign Affairs of Japan.

Government of Japan. (2018). *Diplomatic Bluebook 2018*. Ministry of Foreign Affairs of Japan.

Government of Japan. (2019). *Diplomatic Bluebook 2019*. Ministry of Foreign Affairs of Japan.

Government of Japan. (2020). *Diplomatic Bluebook 2020*. Ministry of Foreign Affairs of Japan.

Government of the United States of America. (2017). *National Security Strategy of the United States of America*. SEAL of the President of the United States of America.

Government of the United States of America. (2017). *The 13th Five Year Plan*. U.S-China Economic and Security Review Commission United States of America.

Government of the United States of America. (2019). *China Military Power: Modernizing a Force to Fight and Win*. Defense Intelligence Agency United States of America.

Government of the United States of America. (2019). *Indo-Pacific Strategy Report: Preparedness, Partnerships, and Promoting a Networked Region*. Department of Defense of the United States of America.

Government of the United States of America. (2020). *Military and Security Developments Involving the People's Republic of China 2020: Annual Report to Congress*. Department of Defense United States of America.

Government of the United States of America. (2021). *Military and Security Developments Involving the People's Republic of China 2021*. Department of Defense United States of America.

- Graham, E., Pan, C., Hall, I., Kersten, R., Zala, B., & Percy, S. (2018). *The Centre of Gravity series*. Canberra: ANU Strategic and Defence Studies Centre.
- Japan National Institute for Defense Studies. (2020). *NIDS China Security Report: China's Military Strategy in the New Era*. Shinju-ku: National Institute for Defense Studies.
- Ji, Y. (2018). *Xi Jinping and PLA Transformation Through Reforms*. Singapore: RSIS Publications.
- Lee, L. (2020). *Assessing the Quad: Prospects and Limitations of Quadrilateral Cooperation for Advancing Australia's Interests*. Lowy Institute Analysis.
- Mehra, J. (2020). *The Australia-India-Japan-US Quadrilateral: Dissecting the China Factor*. New Delhi : Observer Research Foundation.
- Michalski, A. (2019). *Diplomacy in a Changing World Order: The Role of Strategic Partnerships*. Stockholm: The Swedish Institute of International Affairs .
- Miyagi, T. (2019). *Thesis: The Changing Security Dynamics in the Indo-Pacific: The Re-Emergence of the Quadrilateral Security Dialogue*. Malmö: Malmö University, Department of Global Political Studies, Bachelor Program International Relations.
- Rana, YSM., SM., B. D. (2017). *The Current Chinese Defence Reforms and Impact on India*. New Delhi: KW Publishers Pvt., Ltd.
- Smith, J. M. (2020). *The Quad 2.0: A Foundation for a Free and Open Indo-Pacific*. Washington D.C.: Asian Studies Center, The Heritage Foundation.
- The International Institute for Strategic Studies. (2018). *The Military Balance 2018: The Annual Assessment of Global Military Capabilities and Defence Economics*. Routledge.
- The International Institute for Strategic Studies. (2019). *The Military Balance 2019: The Annual Assessment of Global Military Capabilities and Defence Economics*. Routledge.
- The International Institute for Strategic Studies. (2020). *The Military Balance 2020: The Annual Assessment of Global Military Capabilities and Defence Economics*. Routledge.
- The International Institute for Strategic Studies. (2021). *The Military Balance 2021: The Annual Assessment of Global Military Capabilities and Defence Economics*. Routledge.
- The National Institute for Defense Studies. (2018). *East Asian Strategic Review 2018*. Tokyo: The Japan Times, Ltd.
- The National Institute for Defense Studies. (2019). *East Asian Strategic Review*. Tokyo: The Japan Times, Ltd.
- The National Institute for Defense Studies. (2020). *East Asian Strategic Review*. Tokyo: The Japan Times, Ltd.



The State Council Information Office of the People's Republic of China. (2019). *China's National Defense in the New Era*. Beijing: Foreign Languages Press Co. Ltd.

Whitson, L. A. (1998). *Strategy Research Project: Strategic Leadership Assessment of Peter the Great*. Pennsylvania: U.S. Army War College.

### **Sumber Online:**

Australian Government. (2017, November 12). *Australia-India-Japan-United States Consultations on the Indo-Pacific*. Retrieved from Department of Foreign Affairs and Trade of Australia: <https://www.dfat.gov.au/news/media/Pages/aus-india-japan-us-consultations-on-the-indo-pacific>

Australian Government. (2018, June 07). *Australia-India-Japan-United States Consultations*. Retrieved from Department of Foreign Affairs and Trade of Australia: <https://www.dfat.gov.au/news/media/Pages/australia-india-japan-united-states-consultations>

Australian Government. (2018, November 15). *Australia-India-Japan-United States Consultations*. Retrieved from Department of Foreign Affairs and Trade of Australia: <https://www.dfat.gov.au/news/media/Pages/australia-india-japan-united-states-consultations-2018>

Australian Government. (2019, November 04). *Australia-India-Japan-United States 'Quad' Consultations*. Retrieved from Department of Foreign Affairs and Trade of Australia: <https://www.dfat.gov.au/news/media/Pages/australia-india-japan-united-states-quad-consultations>

Australian Government. (2019, May 31). *Australia-India-Japan-United States Consultations*. Retrieved from Department of Foreign Affairs and Trade of Australia: <https://www.dfat.gov.au/news/media/Pages/australia-india-japan-usa-consultations>

Australian Government. (2020, September 25). *Australia-India-Japan-United States Quad Consultations*. Retrieved from Department of Foreign Affairs and Trade of Australia: <https://www.dfat.gov.au/news/media-release/australia-india-japan-united-states-quad-consultations>

Australian Government. (2020, December 18). *Australia-India-Japan-United States Quad Senior Officials Meeting*. Retrieved from Department of Foreign Affairs and Trade of Australia: <https://www.dfat.gov.au/news/media-release/australia-india-japan-united-states-quad-senior-officials-meeting>

China Daily. (2017, October 18). *Five Years of Accomplishments*. Retrieved from The State Council of the People's Republic of China: [http://english.www.gov.cn/19thcpcongress/achievements/2017/10/18/content\\_281475911928290.htm](http://english.www.gov.cn/19thcpcongress/achievements/2017/10/18/content_281475911928290.htm)

- Department of the United States of America. (2019, May 31). *U.S.-Australia-India-Japan Consultations (“The Quad”)*. Retrieved from U.S Department of State: <https://2017-2021.state.gov/u-s-australia-india-japan-consultations-the-quad/index.html>
- Government of India. (2017, November 12). *India-Australia-Japan-U.S. Consultations on Indo-Pacific (November 12, 2017)*. Retrieved from Ministry of External Affairs of India: [https://mea.gov.in/press-releases.htm?dtl/29110/IndiaAustraliaJapanUS\\_Consultations\\_on\\_IndoPacific\\_November\\_12\\_2017](https://mea.gov.in/press-releases.htm?dtl/29110/IndiaAustraliaJapanUS_Consultations_on_IndoPacific_November_12_2017)
- Government of India. (2018, November 15). *India-Australia-Japan-U.S. Consultations*. Retrieved from Ministry of External Affairs of India: [https://www.mea.gov.in/press-releases.htm?dtl/30593/IndiaAustraliaJapanUS\\_Consultations](https://www.mea.gov.in/press-releases.htm?dtl/30593/IndiaAustraliaJapanUS_Consultations)
- Government of India. (2018, June 18). *India-Australia-Japan-US Consultations*. Retrieved from Ministry of External Affairs of India: <https://mea.gov.in/press-releases.htm?dtl/29961/>
- Government of India. (2019, May 31). *India-Australia-Japan-United States Consultations*. Retrieved from Ministry of External Affairs of India: <https://mea.gov.in/press-releases.htm?dtl/31403/>
- Government of India. (2020, September 08). *Situation in Eastern Ladakh*. Retrieved from Ministry of External Affairs of India: <https://www.mea.gov.in/press-releases.htm?dtl/32946/situation+in+eastern+ladakh>
- Government of Japan. (2017, November 12). *Australia-India-Japan-U.S. Consultations on the Indo-Pacific*. Retrieved from Ministry of Foreign Affairs of Japan: [https://www.mofa.go.jp/press/release/press4e\\_001789.html](https://www.mofa.go.jp/press/release/press4e_001789.html)
- Government of Japan. (2018, June 07). *Japan- Australia-India- U.S. Consultations*. Retrieved from Ministry of Foreign Affairs of Japan: [https://www.mofa.go.jp/press/release/press4e\\_002062.html](https://www.mofa.go.jp/press/release/press4e_002062.html)
- Government of Japan. (2019, September 26). *Japan-Australia-India-U.S. Ministerial*. Retrieved from Ministry of Foreign Affairs of Japan: [https://www.mofa.go.jp/fp/nsp/page3e\\_001112.html](https://www.mofa.go.jp/fp/nsp/page3e_001112.html)
- Government of Japan. (2020, December 18). *Japan -Australia-India-U.S. Consultations*. Retrieved from Ministry of Foreign Affairs of Japan: [https://www.mofa.go.jp/press/release/press1e\\_000165.html](https://www.mofa.go.jp/press/release/press1e_000165.html)
- Government of Japan. (2020, October 06). *The Second Japan-Australia-India-U.S. Foreign Ministers’ Meeting*. Retrieved from Ministry of Foreign Affairs of Japan: [https://www.mofa.go.jp/press/release/press6e\\_000244.html](https://www.mofa.go.jp/press/release/press6e_000244.html)
- Government of the United States of America. (2017, November 12). *Australia-India-Japan-U.S. Consultations on the Indo-Pacific*. Retrieved from U.S

Department of State: <https://2017-2021.state.gov/australia-india-japan-u-s-consultations-on-the-indo-pacific/index.html>

Government of the United States of America. (2018, June 07). *U.S.-Australia-India-Japan Consultations*. Retrieved from U.S Department of State: <https://2017-2021.state.gov/u-s-australia-india-japan-consultations/index.html>

Government of the United States of America. (2018, November 15). *U.S.-Australia-India-Japan Consultations*. Retrieved from U.S Department of State: <https://2017-2021.state.gov/u-s-australia-india-japan-consultations-2/index.html>

Government of the United States of America. (2020, September 25). *U.S.-Australia-India-Japan Consultations ("The Quad")*. Retrieved from U.S Department of State: <https://2017-2021.state.gov/u-s-australia-india-japan-consultations-the-quad-3/index.html>

Government of the United States of America. (2020, December 18). *U.S.-Australia-India-Japan Consultations ("The Quad") Senior Officials Meeting*. Retrieved from U.S Department of State: <https://2017-2021.state.gov/u-s-australia-india-japan-consultations-the-quad-senior-officials-meeting/index.html>

Government of the United States of America. (2020, May 26). *United States Strategic Approach to the People's Republic of China*. Retrieved from Executive Office of the President of the United States of America: <https://trumpwhitehouse.archives.gov/articles/united-states-strategic-approach-to-the-peoples-republic-of-china/>

Hong, Z., & Yiwei, H. (2019, August 13). China Global Television Network. Retrieved from China's Defense White Paper in Graphics: Reform Spending and Strategy: <https://news.cgtn.com/news/2019-07-24/China-s-defense-white-paper-in-graphics-IAhU3WlUGY/index.html>

Panyue, H. (2018, January 06). *China issues new training guideline for military*. Retrieved from Ministry of National Defense of the People's Republic of China: [http://eng.mod.gov.cn/news/2018-01/26/content\\_4803411.htm](http://eng.mod.gov.cn/news/2018-01/26/content_4803411.htm)

White, A. (2011, June 13). *Paper: The Role of Marius's Military Reforms in the Decline of the Roman Republic*. Retrieved from Semantic Scholar: <https://www.semanticscholar.org/paper/%E2%80%9CThe-Role-of-Marius%E2%80%99s-Military-Reforms-in-the-of-%E2%80%9D-White/64b6752919e253964d16ddfb4d78b0614833e1ef#related-papers>

Xinhua. (2017, August 01). *'Be Ready to Win Wars,' President Xi Orders Reshaped PLA*. Retrieved from The State Council of the People's Republic of China: [http://english.www.gov.cn/news/top\\_news/2017/08/01/content\\_281475766226496.htm](http://english.www.gov.cn/news/top_news/2017/08/01/content_281475766226496.htm)

Xinhua. (2017, October 24). *Full Text of Resolution on Amendment to CPC Constitution*. Retrieved from The State Council of the People's Republic of

China:

[http://english.www.gov.cn/news/top\\_news/2017/10/24/content\\_281475919837140.htm](http://english.www.gov.cn/news/top_news/2017/10/24/content_281475919837140.htm)

Xinhua. (2017, October 24). *Full Text of Resolution on CPC Central Committee Report*. Retrieved from The State Council of the People's Republic of China: [http://english.www.gov.cn/news/top\\_news/2017/10/24/content\\_281475919786014.htm](http://english.www.gov.cn/news/top_news/2017/10/24/content_281475919786014.htm)

Xinhua. (2017, July 30). *President Xi Calls for Strong Military to Defeat Invading Enemies, Safeguard World Peace*. Retrieved from The State Council of the People's Republic of China: [http://english.www.gov.cn/news/top\\_news/2017/07/30/content\\_281475761687114.htm](http://english.www.gov.cn/news/top_news/2017/07/30/content_281475761687114.htm)

Xinhua. (2017, November 17). *Profile: Xi Jinping and His Era*. Retrieved from The State Council of the People's Republic of China: [http://english.www.gov.cn/news/top\\_news/2017/11/17/content\\_281475945550012.htm](http://english.www.gov.cn/news/top_news/2017/11/17/content_281475945550012.htm)

Xinhua. (2017, March 16). *Report on the Work of the Government*. Retrieved from The State Council of the People's Republic of China: [http://english.www.gov.cn/premier/news/2017/03/16/content\\_281475597911192.htm](http://english.www.gov.cn/premier/news/2017/03/16/content_281475597911192.htm)

Xinhua. (2017, September 23). *Xi Stresses Integrated Military, Civilian Development*. Retrieved from The State Council of the People's Republic of China: [http://english.www.gov.cn/news/top\\_news/2017/09/23/content\\_281475878519346.htm](http://english.www.gov.cn/news/top_news/2017/09/23/content_281475878519346.htm)

Xinhua. (2018, July 27). *China to Further Improve Welfare for Disabled Veterans*. Retrieved from The State Council of the People's Republic of China: [http://english.www.gov.cn/state\\_council/ministries/2018/07/27/content\\_281476238559482.htm](http://english.www.gov.cn/state_council/ministries/2018/07/27/content_281476238559482.htm)

Xinhua. (2018, May 17). *Xi Demands High-Level Research Institutions for Strong Military*. Retrieved from The State Council of the Republic Of China: [http://english.www.gov.cn/news/top\\_news/2018/05/17/content\\_281476150138132.htm](http://english.www.gov.cn/news/top_news/2018/05/17/content_281476150138132.htm)

Xinhua. (2019, April 13). *China releases new syllabus for military courses in universities*. Retrieved from The State Council of the People's Republic of China: [http://english.www.gov.cn/state\\_council/ministries/2019/04/13/content\\_281476606995330.htm](http://english.www.gov.cn/state_council/ministries/2019/04/13/content_281476606995330.htm)

Xinhua. (2019, September 06). *China to Increase Vocational Education for Veterans*. Retrieved from The State Council of the People's Republic of China: [http://english.www.gov.cn/statecouncil/ministries/201909/06/content\\_WS5d719402c6d0c6695ff7fe47.html](http://english.www.gov.cn/statecouncil/ministries/201909/06/content_WS5d719402c6d0c6695ff7fe47.html)

Zhuo, C. (2019, August 08). *What protection do China and the U.S. provide for their veterans?* Retrieved from Ministry of National Defense of the People's Republic of China: [http://eng.mod.gov.cn/news/2019-08/02/content\\_4847164.htm](http://eng.mod.gov.cn/news/2019-08/02/content_4847164.htm)